



**PERANAN NAHDLATUL ULAMA DALAM POLITIK INDONESIA  
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965**

**SKRIPSI**

Oleh

**Klavi Novia Devi Puspitasari  
NIM 080210302031**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**PERANAN NAHDATUL ULAMA DALAM POLITIK INDONESIA  
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sejarah ( S1 )  
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

**Klavi Novia Devi P.  
NIM 080210302031**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

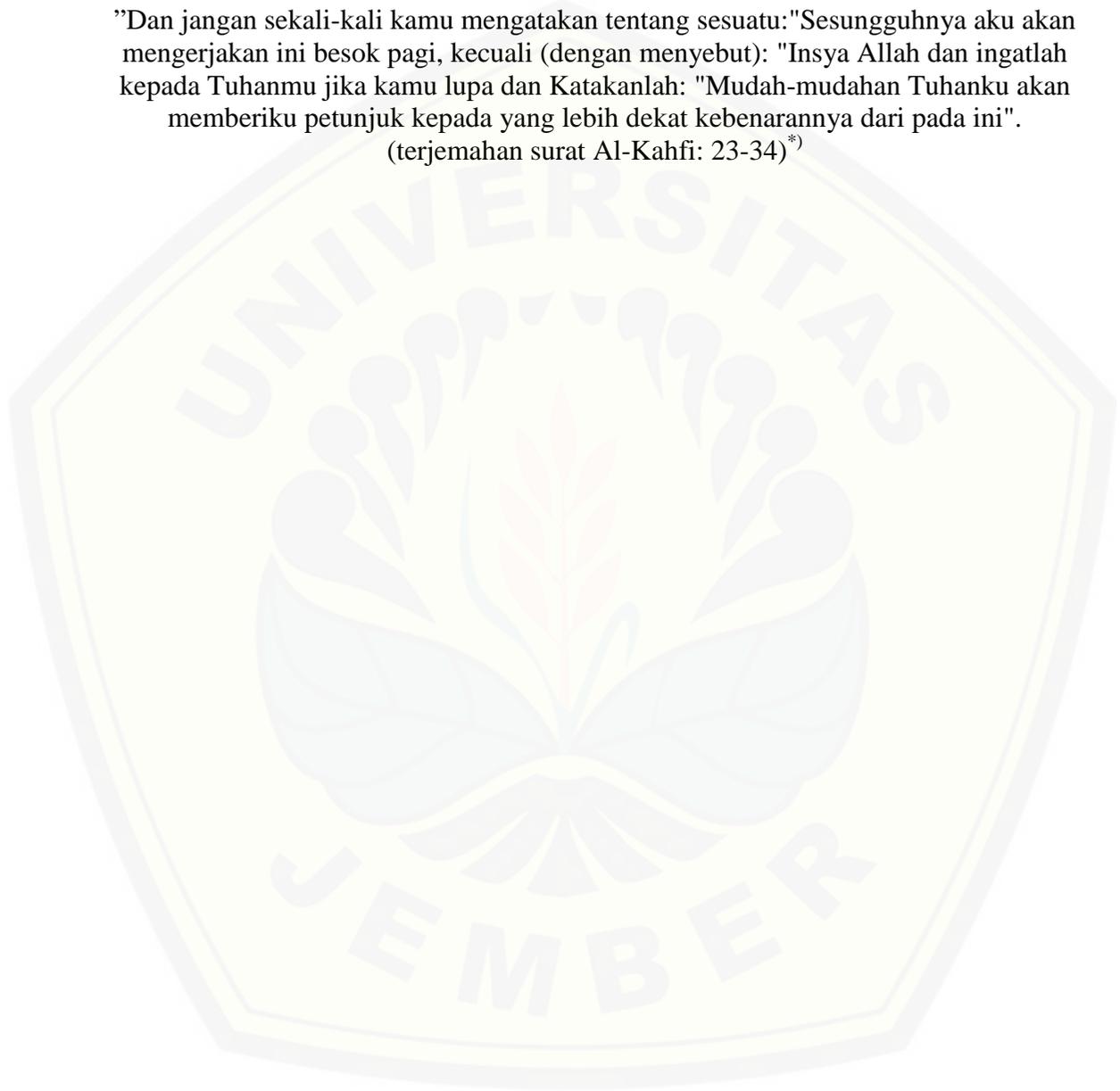
## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan syukur kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta Ibunda Mi'rojatin Rahayu dan Ayahanda Mulyanto yang tercinta,
2. Suami saya “Amat Sholeh”. Yang selama ini selalu memberikan dukungan baik moril dan materiil serta memberikan semangat yang tiada henti dan putus asa kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
3. Kedua adikku yang saya sayangi. Renisa Diah Sari dan Septiana Tri Prabasari
4. Guru - guru dan dosen-dosenku tercinta sejak taman kanak – kanak sampai perguruan tinggi
5. Teman – teman seangkatan dan seperjuangan “ Angkatan 2008 “ yang selalu kompak, terima kasih bersama kalian aku telah menemukan arti dari sebuah persahabatan dalam kebersamaan
6. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas jember

## MOTTO

”Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: "Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan Katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini".  
(terjemahan surat Al-Kahfi: 23-34)<sup>\*)</sup>



---

\*) Departemen Agama Republik Indonesia.1998. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Klavi Novia Devi P.

NIM : 080210302031

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : *Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965*” adalah benar – benar hasil karya sendiri , kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya , tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Maret 2015

Yang menyatakan,

Klavi Novia Devi P.  
NIM 080210302031

**SKRIPSI**

**PERANAN NAHDATUL ULAMA DALAM POLITIK INDONESIA  
PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1959-1965**

Oleh

Klavi Novia Devi P.

NIM 080210302031

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Marjono, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M.Hum

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peranan Nahdatul Ulama Dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada :

hari, tanggal : Rabu, 30 Desember 2015

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Marjono M.Hum  
NIP. 196004221988 02 1 001

Dr. Sumardi, M.Hum  
NIP. 19600518198902 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sugiyanto, M. Hum  
NIP. 195702201985 03 1 003

Drs. Kayan Swastika, M.Si  
NIP. 196702102002 12 1 002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd  
NIP. 19540501 198303 1 005

## RINGKASAN

**Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965**; Klavi Novia Devi, 080210302031; 2016; xv + 64 halaman ; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Pada bulan Juli 1959, secara resmi Presiden Soekarno membacakan sebuah dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya babak sejarah baru dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Pada masa Demokrasi Terpimpin parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata, sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerja sama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Partai-partai tersebut tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik juga tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik Nasional dalam awal tahun Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya.

Pada saat Demokras Terpimpin dimulai Nahdatul Ulama tidak menunjukkan sikap tegasnya dalam menolak atau menerima konsep demokrasi terpimpin yang digagas oleh Soekarno. Hal ini berbeda dengan Masyumi dan Partai Katolik yang menolak dengan keras gagasan Soekarno. Di sisi lain Nahdatul Ulama merupakan kekuatan politik Islam yang diperhitungkan pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politiknya hanya sebatas untuk berpartisipasi dan melindungi kepentingan serta basis massanya. Nahdatul Ulama mampu berdiri di tengah-tengah tiga penguasa Demokrasi Terpimpin, yaitu Soekarno, Militer dan PKI. Dalam kondisi seperti itu Nahdatul Ulama masih harus menghadapi ancaman dari lawan politiknya yaitu PKI. Ketegangan ini terjadi di pedesaan yang merupakan basis wilayah massa kedua partai

tersebut. Hubungan antara kaum muslimin di pedesaan dengan para anggota komunis juga diwarnai oleh prasangka dan kebencian yang meledak dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik pada tahun 1964 dan tahun 1965. Dimana ketika PKI melakukan aksi sepihak untuk melaksanakan Land reform.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana konsep dan pandangan pada masa Demokrasi Terpimpin? (2) Bagaimana persaingan dan kerja sama politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin? (3) Bagaimana akhir dari Partisipasi NU pada masa Demokrasi Terpimpin? . Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah: (1) Ingin mendeskripsikan konsep dan pandangan masa Demokrasi Terpimpin; (2) Ingin menganalisis dan mendeskripsikan persaingan dan kerja sama politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin; (3) Ingin mengkaji akhir dari partisipasi NU pada masa Demokrasi Terpimpin. Diharapkan karya tulis ini memberikan manfaat sebagai berikut : (1) bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga untuk menambah pemahaman materi sejarah nasional Indonesia khususnya peranan NU dalam Politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin; (2) bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1969-1965; (3) bagi pengurus wilayah NU, merupakan sumbangan pemikiran dan referensi tentang peranan Nahdatul Ulama dalam Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 ; (4) bagi umat NU, penelitian ini mampu menjadi acuan untuk perkembangan NU ke depannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari kegiatan heuristik, kritik, intepretasi, historiografi. Dengan pendekatan sosiologi dan teori pembuatan kebijakan

Hasil dari pembahasan ini adalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Nahdatul Ulama dalam politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 tidak hanya mampu menjadi partai politik saja, akan tetapi Nahdatul Ulama juga melakukan kerjasama dengan pemeran Demokrasi Terpimpin lainnya

seperti salah satunya dengan Angkatan Darat hubungan yang terjalin dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dipelopori oleh Nahdatul Ulama untuk memenangkan kemerdekaan. Suatu hubungan kerjasama antara pimpinan Angkatan Darat dan pimpinan Nahdatul Ulama yang terjalin pada awal demokrasi terpimpin karena adanya persamaan antara Nahdatul Ulama dengan Angkatan Darat dalam kurun waktu Demokrasi Terpimpin adalah keinginan keduanya untuk membendung sekecil mungkin pengaruh PKI.

Kesimpulan yang dapat diambil secara garis besar dalam penelitian ini adalah Dari hasil penelitian mengenai peranan Nahdatul Ulama dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa meskipun Nahdatul Ulama berdiri di tengah-tengah tiga kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin waktu itu. Nahdatul Ulama juga mampu menjadi kekuatan politik Islam dan partai politik Islam yang diperhtungkan pada masa Demokrasi Terpimpin. Selain itu Nahdatul Ulama juga bisa memainkan peranannya pada masa Demokrasi Terpimpin dengan menjalin hubungan baik dan kerja sama dengan beberapa pemeran dan salah satu dari tiga kekuatan yang dimiliki pada masa demokrasi terpimpin yaitu Angkatan Darat.

Saran penulis kepada pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sejarah berdirinya NU beserta peranannya dalam politik Demokrasi Terpimpin.

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Nahdatul Ulama Dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965” . Skripsi ini disusun memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu ( S1 ) pada Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, MSc, Ph. D, selaku Rektor Universitas Jember
2. Prof. Dr. Sunardi, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember ;
3. Dr. Sukidin, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember ;
4. Dr. Nurul Umamah, M. Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember ;
5. Bapak Drs. Marjono, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, dan Dr. Sumardi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini ;
6. Drs. Sumarno, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
7. Dosen-dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, yang bersedia berbagi ilmu dan pngalaman selama perkuliahan
8. Ibunda Mi’rojatin Rahayu dan Ayahanda Mulyanto yang telah memberikan dorongan dan do’anya demi terselesainya skripsi ini serta kedua adikku yang saya sayangi. Renisa Diah Sari dan Septiana Tri Prabasari;

9. Suami saya “Amat Sholeh”. Yang selama ini selalu memberikan dukungan baik moril dan materiil serta memberikan semangat yang tiada henti dan putus asa kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik
8. Teman – teman seangkatan 2008 ;
9. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember ;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Manusia tiadalah yang sempurna, sehingga apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dalam hal penulisan ataupun lainnya. Maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat membantu demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 18 Maret 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul.....	5
<b>1.3 Ruang Lingkup Penelitian dan Rumusan Permasalahan</b> .....	6
1.3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.3.2 Rumusan Permasalahan.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	20
<b>BAB 4. KONSEP DAN PANDANGAN DEMOKRASI TERPIMPIN</b>	
4.1 Konsep Demokrasi Terpimpin .....	23
4.2 Demokrasi Terpimpin dan Partai Politik .....	27
4.3 Pandangan K.H Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin .....	30

**BAB 5. PERSAINGAN DAN KERJA SAMA POLITIK NU PADA MASA**

**DEMOKRASI TERPIMPIN**

5.1	Polarisasi kekuatan dalam Demokrasi Terpimpin .....	33
5.2	Tanggapan NU terhadap Demokrasi Terpimpin .....	35
5.3	Kiprah NU dalam berbagai Lembaga Politik .....	40
5.4	NU Dan Para Pemeran Demokrasi Terpimpin Lainnya .....	
5.4.1	NU Dan Soekarno .....	43
5.4.2	NU Dan Angkatan Darat .....	46

**BAB 6. PERANAN NAHDATUL ULAMA DALAM SISTEM**

**PEMERINTAHAN DEMOKRASI TERPIMPIN TAHUN 1960-1965**

6.1	NU dalam berdirinya IAIN dan penyerahan Irian Barat .....	51
6.2	NU dalam masalah Land Reform .....	53

**BAB 7. PENUTUP**

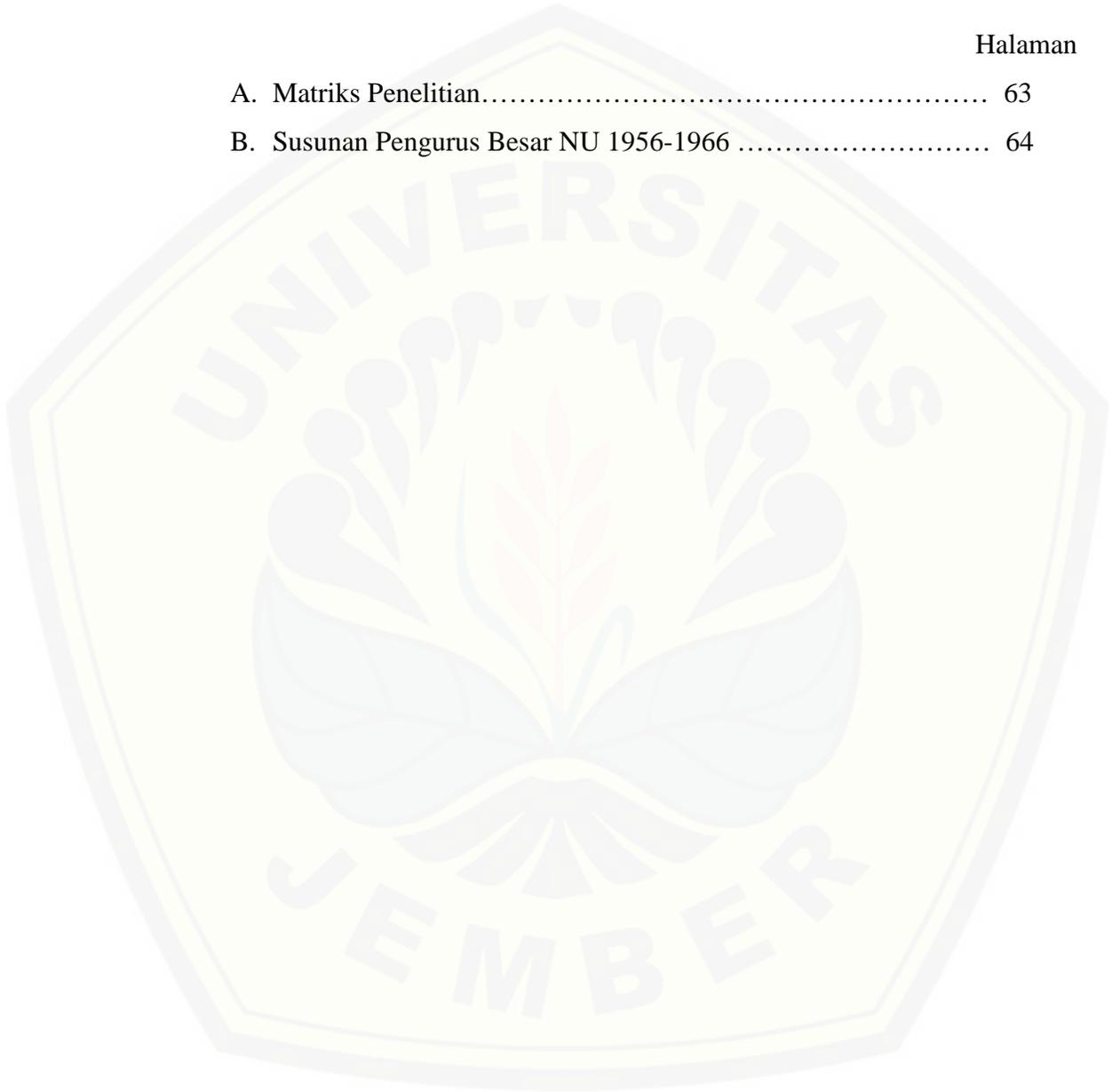
7.1	Kesimpulan .....	56
7.2	Saran .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	62
-----------------------	----

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
A. Matriks Penelitian.....	63
B. Susunan Pengurus Besar NU 1956-1966 .....	64



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada bulan Juli 1959, secara resmi Presiden Soekarno mengembalikan negara ke bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang revolusioner, dimana presiden memainkan peran sebagai pemimpin. Presiden Soekarno juga membacakan sebuah Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu Demokrasi Terpimpin. Perubahan itu juga diikuti dengan perombakan secara radikal terhadap seluruh bagian kehidupan bernegara yang disahkan sebagai tahun kembali ke revolusi 1945. Masyarakat dibawa ke dalam suasana progresif revolusioner dan diajak untuk bergotong-royong melanjutkan revolusi. Ideologi dirumuskan kembali, sedangkan alat-alat negara yang telah usang harus diganti (*retooling*). Norma-norma politik yang ada di masa lalu dianggap tidak berlaku lagi (Crouch, 1999:66).

Di sisi lain kekuatan politik yang sebelumnya tidak begitu berperan, kini mulai mengambil alih jalannya sejarah. Di bawah UUD 1945 yang diberlakukan kembali, Soekarno yang pada masa Demokrasi Parlementer hanya berkedudukan sebagai simbol, kini menjadi presiden seutuhnya, tokoh yang menguasai, dan sumber kepemimpinan ideologi. Diakuinya kembali UUD 1945 juga menaikkan posisi politik militer dalam hal ini Angkatan Darat. Angkatan Darat yang sejak diberlakukannya *Staat van Oorlog en Beleg (SOB)* tahun 1957 dengan leluasa terjun di bidang non militer, kini makin memantapkan kedudukan politik mereka (Feith, 1995:33). Di saat mayoritas partai politik mengalami delegitimasi yang serius. PKI yang bangkit sepanjang dasawarsa tahun 1950 memperoleh kesempatan untuk tampil di panggung politik.

Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistem Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap

sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit inilah yang menyebabkan tidak adanya rasa kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Akan tetapi Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang seimbang dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar mereka menyokong apa yang telah dilakukan olehnya. Sebaliknya, golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden (Crouch,1999:76).

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti MANIPOL-USDEK dan Nasakom. Dalam usahanya untuk mendapatkan dukungan

yang luas dalam kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan atau kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh di dunia. Yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Neokolim (Neokolonialis, Kolonialis dan Imperialis). Soekarno juga ingin menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional dalam mengatasi persaingan politik yang akan mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

Beberapa tahun sebelum Dekrit dibacakan, tepatnya pada bulan Februari 1957, Nahdatul Ulama sebagai salah satu kekuatan politik yang sangat diperhitungkan tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menolak maupun menerima konsep Demokrasi Terpimpin yang digagas oleh Soekarno. Hal ini berbeda dengan Masyumi dan Partai Katolik yang menolak dengan keras gagasan Soekarno. Bahkan dalam Sidang Pleno yang digelar pada tanggal 9-10 Maret 1957 bersama-sama dengan konsul se Indonesia. Nahdatul Ulama pada akhirnya menyetujui gagasan yang menyatakan bahwa syarat Dewan Nasional hanya berfungsi sebagai penasehat dan tidak mempunyai konsekuensi politis, serta pembentukannya dilakukan oleh kabinet bersama Kepala Negara. Penerimaan tersebut lebih didasarkan kepada prinsip *dar' al mafa sid muqaddamu 'ala jalb al-masalih* (menghindari bahaya didahulukan dari mengambil manfaat) karena kecenderungan Soekarno semakin dekat dengan komunis.

Meskipun demikian telah terjadi adanya perbedaan pendapat dikalangan pucuk pimpinan Nahdatul Ulama tentang dukungan Nahdatul Ulama terhadap konsepsi Soekarno tersebut. Semua fraksi di dalam Nahdatul Ulama menentang keikutsertaan kaum komunis dalam pemerintahan, tetapi banyak diantara mereka yang tidak mempunyai keberatan lain terhadap kebijakan Soekarno misalnya, K.H. Wahab Hasbullah yang menjabat sebagai Rais Aam dalam Partai Besar Nahdatul Ulama yang juga pengagum berat Soekarno sekaligus mendukung gagasan Soekarno. Pemimpin Nahdatul Ulama ditingkat Tanfidziyah seperti K.H.A. Syaichu, K.H. Masykur, K.H. Idham Chalid dan K.H. Saifuddin Zuhri dengan mudah menyesuaikan

diri dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Tokoh Nahdatul Ulama yang paling tegas menolak adalah K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Achmad Siddiq, K.H. M. Dachlan (wakil ketua umum Partai Besar Nahdatul Ulama) dan Imron Rosyadi (Ketua GP Ansor) (Bruinessen, 1999:74).

Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang dibentuk oleh Soekarno pada tahun 1960. Zainul Arifin dari Nahdatul Ulama terpilih sebagai ketua DPRGR. Masyumi dan PSI yang menjadi penentang Demokrasi Terpimpin tidak lagi terwakili dalam DPRGR. Hampir semua kursi yang ada diberikan untuk wakil-wakil “golongan fungsional” termasuk juga dari kalangan militer. Kebanyakan politisi Nahdatul Ulama tidak menentang adanya campur tangan Soekarno terhadap lembaga parlemen tersebut serta menerima kursi yang disediakan bagi mereka dalam DPRGR. Meskipun terlihat menyesuaikan diri, Nahdatul Ulama mampu tampil dalam berbagai hal dengan menggunakan posisi politiknya sebagai “orang dalam pemerintah” untuk melawan agitasi dan aksi sepihak PKI yang terjadi di banyak tempat. Sistem Demokrasi Terpimpin dengan landasan konstitusional UUD 1945 memberi kekuasaan yang sangat besar ditangan Presiden. Menurut Njono, Nahdatul Ulama sangat menyulitkan PKI karena posisinya yang sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Sebagian besar pemimpin Nahdatul Ulama tetap menjaga kedekatan hubungan dengan Soekarno pada periode Demokrasi Terpimpin. (Ali,1998:168). K.H. Idham Chalid yang menjabat sebagai ketua umum Tanfiziyah pada masa itu menjadi pembela yang bersemangat dari ideologi populis Soekarno. Oleh karena itu K.H. Idham Chalid mendapatkan jabatan yang tinggi sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Nahdatul Ulama merupakan kekuatan politik Islam yang diperhitungkan pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politiknya hanya sebatas untuk berpartisipasi dan melindungi kepentingan partai serta basis massanya. Pada tahun 1964 K.H. Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Api Islam. Yayasan ini bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan politik Soekarno di kalangan muslim tradisional, akan tetapi usaha ini tidak cukup

mampu menarik perhatian penguasa. Nahdatul Ulama juga tidak banyak mempengaruhi arah dan kebijakan negara pada waktu itu dikarenakan porsinya yang sangat terbatas.

Dalam hal ini Nahdatul Ulama diibaratkan seperti “anak kecil” yang berdiri dihadapan penguasa Demokrasi Terpimpin, yaitu Soekarno, Militer dan PKI. Dalam kondisi seperti itu, NU juga harus menghadapi ancaman dari lawan politiknya yaitu PKI. Ketegangan ini terjadi di pedesaan, yang merupakan wilayah basis massa kedua partai tersebut. Hubungan antara kaum muslimin di pedesaan dengan para anggota komunis juga diwarnai oleh prasangka dan kebencian yang meledak dalam bentuk bentrokan dan kekerasan fisik pada tahun 1964 dan tahun 1965. Dimana ketika PKI melakukan ‘aksi sepihak’ untuk melaksanakan *land reform*. Aksi sepihak ini telah mengubah ketakutan terhadap serangan komunis menjadi kenyataan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 dengan beberapa pertimbangan yaitu : (1) literatur dan sumber dapat dijangkau, (2) topik belum pernah diteliti secara mendalam oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Jember, dan (3) kesediaan dosen pembimbing untuk membimbing penulis dalam penelitian ini.

## 1.2 Penegasan Pengertian Judul

Penegasan pengertian judul dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian “ Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965”. Kata peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (1996:751). Anam (1985:16) dalam buku yang berjudul “*Pertumbuhan dan perkembangan Nahdatul Ulama*” menjelaskan bahwa yang dimaksud organisasi Nahdatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh para ulama pesantren yang memegang teguh salah satu empat mazhab

yang berhaluan *Ahlusunnah wal jamaah* yang bertujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah wal jamaah* serta memperhatikan masalah-masalah sosial, ekonomi dan perdagangan dalam rangka pengabdian kepada bangsa, Negara dan ummat manusia. Politik merupakan perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atas nama pemerintah atau Negara.

Menurut Syamsuddin (1989:135) mengemukakan demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 1965.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka penulis menegaskan maksud dari judul “ Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965” adalah berbagai usaha yang dilakukan Nahdatul Ulama dalam mempertahankan eksistensinya dalam politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin baik secara fisik maupun politik.

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dimaksudkan agar menghindari penyimpangan-penyimpangan di luar fokus permasalahan dan penelitian sesuai dengan tujuan. Ruang lingkup temporal penelitian ini adalah tahun 1959 sampai tahun 1965 dengan dasar pertimbangan bahwa pada tahun 1959 telah dimulainya babak baru dalam sejarah bangsa Indonesia yakni, Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan pembacaan Dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Sedangkan tahun 1965 dijadikan batasan akhir penelitian karena pada tahun tersebut Demokrasi Terpimpin berakhir dan diiringi juga oleh lengsernya Presiden Soekarno. Dengan demikian tahun ini juga sebagai akhir dari partisipasi Nahdatul Ulama pada masa Demokrasi Terpimpin.

Mengenai ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah peranan Nahdatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan sekaligus politik untuk tetap mempertahankan eksistensinya pada masa demokrasi terpimpin dengan melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga politik di Indonesia seperti salah satunya

bekerja sama dengan DPRGR serta bekerja sama dengan salah satu kekuatan besar pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu TNI Angkatan Darat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Suatu penelitian selalu bertitik tolak pada suatu pokok permasalahan karena dalam suatu permasalahan terdapat bagian-bagian pokok dari suatu penelitian. Permasalahan merupakan bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya (Ali, 1982:31). Winarno Surakhmat berpendapat bahwa permasalahan merupakan hal yang pertama kali harus difikirkan sebelum suatu penelitian dilakukan (1980:33). Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimana konsep dan pandangan pada masa Demokrasi Terpimpin?
2. bagaimana persaingan dan kerja sama politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin?
3. bagaimana peranan Nahdatul Ulama dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini maka besar harapan penulis untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas penulis dapat mengemukakan beberapa tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini yakni :

1. ingin mendeskripsikan konsep dan pandangan masa Demokrasi Terpimpin;
2. ingin menganalisis dan mendeskripsikan persaingan dan kerja sama politik NU pada masa Demokrasi Terpimpin;
3. ingin mengkaji peranan Nahdatul Ulama dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan di atas maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga untuk menambah pemahaman materi sejarah nasional Indonesia khususnya peranan NU dalam Politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin
2. bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1969-1965
3. bagi pengurus wilayah NU, merupakan sumbangan pemikiran dan referensi tentang peranan Nahdatul Ulama dalam Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965
4. bagi umat NU, penelitian ini mampu menjadi acuan untuk perkembangan NU ke depannya

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini merupakan tinjauan terhadap pendapat para ahli dan hasil penelitian serta kajian teori terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kajian teori ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membandingkan teori-teori yang sudah ada dan memilih teori yang relevan terhadap penelitian yang akan dibahas. Sebagai awal dari penelitian ini peneliti ingin mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan bagaimana konsep dan pandangan mengenai masa Demokrasi Terpimpin serta kerja sama yang dilakukan Nahdatul Ulama dalam masa demokrasi terpimpin, baik kerja sama dengan TNI Angkatan Darat maupun dengan Lembaga Politik pada masa Demokrasi Terpimpin. Hal ini dianggap perlu karena Nahdatul Ulama pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu organisasi keagamaan maupun politik serta menjadi partai yang mampu menunjukkan eksistensi dan kemampuan mereka untuk menjaga kedekatan hubungan dengan Soekarno dan mengelola hubungan dengan kekuatan-kekuatan lainnya, baik yang berada di dalam maupun di luar tubuh Nahdatul Ulama.

Setelah Demokrasi Terpimpin diterapkan dengan diawali oleh adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pimpinan pemerintahan dan angkatan bersenjata diletakkan di bawah kekuasaan Presiden. Bahkan demi kesatuan komando sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Terpimpin, maka pimpinan rakyat perlu diserahkan secara formal kepada Presiden. Pimpinan rakyat diwujudkan dengan membentuk organisasi massa yang dipimpin langsung oleh Presiden. Dengan demikian kekuasaan semakin berpusat ke Istana Negara atau ke tangan Presiden Soekarno.

Menurut Maarif (1998:177) mengemukakan Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) adalah suatu fase politik dan realitas ketatanegaraan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959-1965, atau tepatnya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga gagalnya kudeta 30 September ( G30S )

1965. Suatu masa yang tidak lebih lama dari masa Demokrasi Parlementer yang sebelumnya pernah dijalankan di Indonesia. Hingga akhirnya, Demokrasi Terpimpin identik dengan Soekarno.

Menurut Crouch (1999:44) menyatakan bahwa Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam politik Indonesia pada pertengahan tahun 1950. Untuk menggantikan pertentangan yang terjadi diantara partai-partai di dalam parlemen, maka suatu sistem diciptakan kembali. Dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari Angkatan Darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga Soekarno mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) sedangkan peranan dari golongan agama yang terwakili oleh Nahdatul Ulama kemudian tergabung dalam poros Nasakom-Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.

Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1960, maka Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali struktur konstitusional. Dengan seiring berjalannya waktu perlahan-lahan tujuannya mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, khususnya kepada perumusan ideologi yang disertai dengan gagasan-gagasan Soekarno. Dalam hal ini Presiden Soekarno menciptakan doktrin negara yang baru (Feith, 1995:79).

Ditegaskan pula oleh Feith (1995: 80) dalam bukunya yang berjudul *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*” adanya pidato kenegaraan yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang sebagian besar berisi tentang alasan-alasan yang mengemukakan mengapa harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya. Soekarno menyatakan bahwa naskah pidato tersebut berubah menjadi Manifesto Politik Republik Indonesia. Bersamaan dengan

itu pula Soekarno mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, Soekarno selalu mengatakan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat “MANIPOL”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama “MANIPOL-USDEK”.

Menurut Karim (1993:142) dalam bukunya yang berjudul “*Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*” mengemukakan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik juga tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional terutama pada tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh Soekarno yang menuntut agar kedua partai tersebut mendukung apa yang telah dilakukan oleh presiden. Sebaliknya, di sisi lain golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup termasuk NU dan PNI. Akan tetapi semua partai tersebut wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan Soekarno di berbagai kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin Soekarno.

Dalam menggambarkan kiprah partai politik dipercaturan politik nasional. Terdapat satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Afan Gaffar (2003:65) dalam bukunya yang berjudul “*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*” mengatakan bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin kekuasaan berpusat pada tiga kekuatan yaitu, Soekarno, TNI-

Angkatan Darat, dan PKI. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin maka pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan. PKI dibawah pemimpin mudanya antara lain Aidit dan Nyoto menghimpun massa dengan intensif dan segala cara, baik secara etis maupun tidak etis. Pergerakan PKI yang sangat progresif terutama dalam pengumpulan massa membuat PKI menjadi sebuah partai besar pada akhir periode Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1965 PKI telah memiliki anggota sebanyak tiga juta orang yang kemudian ditambah dengan 17 juta pengikut yang menjadi anggota organisasi pendukungnya, sehingga di negara Indonesia yang masyarakatnya mayoritas adalah non-komunis, PKI merupakan partai terbesar.

Salah satu pimpinan Islam yang secara tegas menerima dan mendukung gagasan Soekarno untuk mendukung Demokrasi Terpimpin adalah K.H. Idham Chalid. Sebagai seorang yang dibesarkan di kalangan tradisional dan mendapatkan pendidikan modern, K.H. Idham Chalid memiliki pandangan visioner dan kepercayaan diri yang kuat. Bagi K.H. Idham Chalid dalam berpolitik seharusnya berorientasi kepada kemaslahatan dan berguna bagi orang banyak. Di saat pemimpin Islam lainnya menolak konsepsi dari Soekarno. K.H. Idham Chalid berusaha mencari penyesuaian dan mempertemukan antara Islam dengan Demokrasi Terpimpin. Terdapat dua hal dalam pandangan Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin. Pertama, K.H. Idham Chalid menyatakan bahwa musyawarah (*syura*) adalah bukti adanya demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain *syura* adalah demokrasi dalam Islam. Kedua, ketika Idham menyamakan beberapa hal dalam *syura* dengan Demokrasi Terpimpin. K.H. Idham Chalid menganggap *syura* (musyawarah) sama dengan demokrasi, dengan kata lain Demokrasi Terpimpin sama halnya dengan musyawarah terpimpin.

Ditegaskan oleh M. Haidar Ali (1998:168) dalam bukunya yang berjudul” *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*”, dalam berbagai hal NU mampu tampil dengan menggunakan posisi politiknya sebagai “orang dalam pemerintah” untuk melawan agitasi dan aksi sepihak PKI di banyak tempat.

Sejak periode peralihan menuju terbentuknya sistem Demokrasi Terpimpin. Partai-partai politik tidak lagi menjadi pemeran utama di atas panggung politik Indonesia. Setelah Masyumi dan PSI kehilangan popularitasnya karena keterlibatan beberapa pimpinan pusatnya dalam pemberontakan PRRI/Permesta, partai-partai politik lain menjadi semakin berhati-hati dan kehilangan peran serta dalam menentukan perkembangan politik selanjutnya. Situasi yang sulit ini tidak berlaku bagi PKI, meskipun dalam melaksanakan kegiatan politiknya partai ini sering menjadi sasaran pelarangan oleh pihak Angkatan Darat (AD). PKI tetap dapat mempertahankan popularitas dan semangat juangnya yang tinggi untuk masuk ke dalam tatanan politik yang baru yaitu masa Demokrasi Terpimpin. Kekuatan politik lain yang juga meningkat popularitasnya adalah TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat tampil untuk menjadi tumpuan dan harapan pada saat itu. Ketika pemerintahan yang dikuasai oleh partai-partai politik semakin jauh terlibat dalam konflik-konflik kepentingan. Dengan adanya keadaan darurat tersebut maka semakin menguatkan posisi Angkatan Darat sebagai salah satu kekuatan politik yang penting dan siap untuk memainkan peranan yang strategis dalam sistem Demokrasi Terpimpin. (Sundhaussen, 1986:184-224)

Ditegaskan pula oleh Feith (1995:135-150) dalam bukunya yang berjudul *Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin* mengemukakan meskipun Angkatan Darat dan PKI adalah kekuatan politik yang penting dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, partai-partai politik juga tetap memainkan peranan sebagai unsur pengimbang di antara tiga pemegang inisiatif politik yang sedang naik perannya yaitu; Presiden Soekarno, TNI-Angkatan Darat dan PKI. Presiden Soekarno masih membutuhkan dukungan dari partai-partai politik dan para pengikut mereka di lingkungan birokrasi. Dalam keadaan ini PNI paling banyak mengambil keuntungan. Sementara NU yang selalu kekurangan tenaga profesional mendapat kesulitan untuk menempatkan anggota-anggotanya di luar Departemen Agama, sedangkan PKI yang baru mempunyai peran penting dalam periode 1963-1965,

selalu mendapat rintangan dari NU dan AD untuk tertibat di dalam birokrasi dan pemerintahan.

Tanggapan NU terhadap sistem Demokrasi Terpimpin dapat dilihat sejak masa transisi menuju periode tersebut. Berbagai krisis politik dalam masa peralihan tersebut muncul secara bergantian antara tahun 1957 hingga tahun 1960 diantaranya adalah pada saat Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya pada tanggal 21 Februari tahun 1957 yang disusul dengan pembentukan Kabinet Karya pada bulan April tahun 1957 dan Dewan Nasional sebulan kemudian. Di akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960 kepemimpinan NU didominasi oleh para kiai dan politisi dengan karakter yang sangat berhati-hati dan kemauan yang tinggi untuk berkompromi dalam politik. Tokoh yang paling menonjol mewakili karakter ini adalah K.H Wahab Chasbullah, Rois Aam Syuriah NU yang memiliki kharisma paling kuat diantara jajaran para kiai lainnya (Sundhaussen,1998:258).

Politik Indonesia pada tahun 1957 yang meningkat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Ali II. Presiden Soekarno segera memberlakukan keadaan darurat perang untuk mencegah disintegrasi dan mengemukakan konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957 sebagai alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi krisis politik yang berlangsung. Partai-partai Islam mengemukakan tanggapan mereka dengan menolak konsepsi presiden. Kiai M. Dahlan (Rois ke 2 NU) dan Imron Rosjadi (Ketua Pemuda Anshor), adalah para pemimpin NU yang sejak awal menentang konsepsi presiden dan gagasan Demokrasi Terpimpin yang terkandung di dalamnya. Mereka khawatir jika pemikiran presiden diterapkan dapat menimbulkan diktator. Imron Rosjadi menegaskan bahwa diktator berlawanan dengan Islam dan sistem pemerintahan harus dikembangkan dengan terlepas dari siapa yang menjadi presiden”. Bahkan ia mengatakan bahwa Dewan Nasional dibentuk hanya untuk keperluan Soekarno (Noer, 1982:353).

Ditegaskan oleh Deliar Noer (1987:402) dalam bukunya yang berjudul “ *Partai Islam di pentas Nasional*”. Sebelum menghadapi pembubaran kabinet hasil pemilu tahun 1955 tepatnya pada tanggal 24 Maret 1960 berdirilah Liga Demokrasi untuk

menentang tindakan Presiden Soekarno yang dinilai tidak konstitusional. Dalam Liga yang hanya berusia pendek ini tergabung dua tokoh NU yang selalu kritis terhadap sistem Demokrasi Terpimpin, yaitu, K.H.M. Dahlan dan Imron Rosjadi. Dikarenakan sikap oposisinya yang konsisten maka pada tahun 1962 Imron Rosjadi bersama beberapa tokoh Masyumi dan PSI dimasukkan kedalam tahanan pemerintah. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa anggota-anggota NU dapat menerima sistem Demokrasi Terpimpin, namun di sisi lain masih ada anggota-anggota NU yang bersikap kritis terhadap sistem tersebut. Pendapat untuk setuju atau menolak untuk bergabung ke dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin, keduanya memilih landasan fiqh yang kuat.

Pidato Presiden Soekarno pada hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1960 menjadi peristiwa yang penting dalam perkembangan Demokrasi Terpimpin. Dalam pidatonya tersebut presiden menyarankan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Badan Perancang Nasional, Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Front Nasional. Dari semua lembaga politik ini hanya dua lembaga saja yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu DPA dan MPR. Sedangkan DPR hasil pemilu tahun 1955 telah dibubarkan pada bulan Maret tahun 1960, dan sebagai gantinya yaitu DPRGR pada bulan Juni tahun 1960. Pada bulan Juli, presiden mengeluarkan ketetapan mengenai penyederhanaan partai-partai yang memuat aturan bahwa 150.000 anggota dan 65 cabang partai dinyatakan sebagai syarat minimal untuk tetap menjadi partai politik (Sundhaussen,1998:258 ).

Sementara itu menurut Ali (1998:161) dalam bukunya yang berjudul "*Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*" mengemukakan bahwa DPRGR yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan partai serta golongan fungsional yang diantaranya adalah tentara, polisi, buruh, petani, ulama, pemuda, wanita, intelektual, dan pendidik. Jumlah keseluruhan anggotanya 283 orang, dengan 129 mewakili partai-partai dan 154 mewakili golongan fungsional. Komposisi DPRGR disusun oleh Presiden Soekarno bersama-sama dengan Idham Chalid (NU), Suwiryo (PNI), Aidit

(PKI). Ruslan Abdulgani (ketua DPAS) dan seorang wakil dari Angkatan Darat, dalam pertemuan di Tampak Siring pada bulan Maret 1960. NU menerima hasil pertemuan Tampak Siring karena dipandang sebagai alternatif sementara yang dapat diterima karena masih melibatkan partai-partai. Dalam hal ini NU tetap menuntut agar diselenggarakan pemilihan umum untuk dapat membentuk parlemen yang representatif. Adanya perdebatan pro dan kontra dalam NU untuk menerima atau menolak DPRGR telah menyebabkan kontroversi yang pada akhirnya NU memutuskan memberi kebebasan pada anggotanya untuk menerima atau menolak penunjukkan sebagai anggota DPRGR.

Kemampuan NU untuk tetap berperan dalam Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipungkiri sangat didukung oleh kemampuan para pemimpinnya dalam menjalin hubungan pribadi dengan Presiden Soekarno. Mereka dapat menjalin hubungan baik, karena pemahaman mereka satu sama lain yang sama-sama dilandasi dengan kuat oleh nilai-nilai budaya Jawa. NU dapat menghargai peranan “sesepuh” yang dimainkan oleh Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin, karena pada hakekatnya hal itu sama dengan peranan yang dimainkan Rois Aam di dalam NU, sehingga tidak mengherankan jika tokoh-tokoh NU seperti K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Idham Chalid, K.H. Saifuddin Zuhri dan H. A. Sjaichu masuk kedalam lingkup orang-orang yang terdekat dengan Soekarno.

Ditegaskan pula oleh Bruinessen dalam bukunya yang berjudul “*NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*”. Hangatnya hubungan NU dengan Soekarno juga tercermin dalam koran Partai NU, Duta Masyarakat. Setiap pernyataan Soekarno dalam periode ini, selalu mendapatkan dukungan dari para pemimpin NU. Seperti dalam masalah Irian Barat, Konfrontasi dengan Malaysia, pengambil alihan perusahaan asing, Deklarasi Ekonomi (Dekon), dan keluarnya Indonesia dan PBB. Ideologi resmi dari Sukarno MANIPOL-USDEK sering dijadikan rujukan untuk melengkapi kaidah-kaidah fiqih dalam setiap pernyataan-pernyataan resmi dan para pemimpin NU. Pada tahun 1964, Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri mendirikan Yayasan Api Islam yang bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran Soekarno di kalangan muslim tradisional.

Sedangkan Kiai Wahab adalah pengagum Soekarno sejak jaman pergerakan. Ia tetap membela Soekarno hingga akhir.

Hubungan NU dan Angkatan Darat (AD) telah dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan. Keduanya memiliki titik persamaan pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya adalah keinginan keduanya untuk membendung sekecil mungkin pengaruh PKI. Untuk kepentingan itu Angkatan Darat mengajak NU bekerja sama. Dukungan lain yang ditunjukkan oleh Nasution diantaranya adalah dukungan nyata terhadap Liga Demokrasi yang dipelopori oleh K.H.M. Dahlan dan Imron Rosjadi. Selain menentang pembubaran DPR, Liga demokrasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh NU, Masyumi dan PSI ini memiliki sikap umum anti komunis. Namun Angkatan Darat tidak dapat berbuat banyak ketika pada bulan Maret 1961 Liga ini dibubarkan oleh presiden dengan tuduhan bertentangan dengan Manipol (Noer, 1987:402).

Hubungan NU dengan partai Islam lainnya seperti PSII dan Perti yang masih tetap bertahan dalam Demokrasi Terpimpin, NU masih menjalin hubungan kerja sama yang baik dan tidak memiliki persoalan. Kerja sama yang mereka galang terlihat dalam DPRGR, yaitu dengan membentuk golongan Islam dalam DPRGR yang di tahun 1960 dipimpin oleh H.A. Sjaichu (NU) dengan Wakil Ketua I, Harsono Cokroaminoto (PSII) dan Wakil Ketua II, K.H. Siradjuddin Abbas (Perti). Segi yang membedakan antara Perti dengan NU dan PSII adalah mengenai hubungan luar negeri. Berbeda dengan para pemimpin NU dan PSII, K.H. Siradjuddin Abbas sering menghadiri kongres di luar negeri yang diselenggarakan oleh organisasi atau negara komunis (Noer, 1987:397).

Penyerahan kedaulatan Irian Barat oleh UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) pada tanggal 1 Mei 1963, dan dicabutnya Undang-Undang Keadaan Bahaya (S.O.B.) di bulan yang sama menandai babak kedua dari Demokrasi Terpimpin. Tertangkapnya tokoh Darul Islam Kartosuwirjo pada tanggal 4 Juni 1962, dan berakhirnya kampanye pembebasan Irian Barat telah menghapus alasan utama Angkatan Darat untuk tetap mempertahankan berlakunya S.O.B. Seiring dengan

semakin condongnya politik luar negeri Indonesia ke kiri, PKI sangat diuntungkan. Maka segi tiga kekuasaan mulai bergeser, dimana PKI menggeser Angkatan Darat menduduki posisi kedua setelah Soekarno dalam berpolitik.

Ditegaskan oleh Maarif dalam bukunya yang berjudul “*Islam dan Politik di Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin*” Dengan adanya kejadian tersebut, NU tidak terlalu mengkhawatirkan perkembangan kekuatan PKI yang terjadi. NU masih mempercayai kemampuan Soekarno sebagai pemimpin negara untuk mengendalikan kekuatan PKI. Disini NU menerapkan sikap *Tasamuh*, terhadap presiden Soekarno, yaitu dengan bersikap tetap toleran walau memiliki perbedaan sikap dalam menghadapi PKI. Hal lain yang menunjukkan kepercayaan NU kepada Soekarno, ketika pada tanggal 18 Mei 1963 Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dalam suatu sidang MPRS. Ketetapan yang bertentangan dengan UUD 1945 ini ditandatangani oleh ketua dan wakil-wakil ketua MPRS, dimana NU diwakili oleh Idham Chalid.

Sementara itu PKI yang tidak sabar dengan pelaksanaan *land reform*, melalui organisasi bentukannya dengan Pemuda Rakyat yang bernama BTI (Barisan Tani Indonesia) melakukan kampanye dan demonstrasi yang pada intinya menentang kepemilikan tanah yang berlebihan baik perorangan maupun individu, hal ini membuat golongan petani muslim merasa terganggu apalagi ada unsur perampasan atas hak milik seseorang. Serangan ini juga berdampak pada golongan santri dan ulama, dimana keberlangsungan hidup mereka banyak yang berganung kepada hasil tanah yang mereka miliki. Bentrok fisik di tahun 1963-1964 seringkali terjadi antara kaum santri dan BTI. Perlawanan terhadap PKI di pedesaan tidak hanya melalui fisik saja, akan tetapi melalui perang wacana dan poster juga dilakukan terutama oleh para santri yang tergolong sudah memiliki pendidikan di pesantren (Noer, 1987:40)

Posisi Soekarno dan para pendukungnya masih tetap kuat hingga awal tahun 1966. Dijelaskan pula oleh Bruinessen dalam bukunya yang berjudul “*NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*” (1999) menjelaskan bahwa hubungan antara Soekarno dengan pucuk pimpinan NU pada waktu itu masih baik. Maka tidak

mengherankan, jika tidak ada satupun suara sumbang terhadap Soekarno ketika ia hadir dalam peringatan ulang tahun NU ke 40 di Stadion Senayan. Pada kesempatan itu, Soekarno yang sudah merasa kedudukannya mulai goyah mengatakan “Saya cinta NU” cintailah saya, Saya rangkul NU maka rangkullah saya”. Namun kecenderungan umum telah berbalik. Sukarno harus turun dari panggung politik. Meski demikian untuk jangka masa beberapa tahun sejak Orde Baru dimulai hingga Pemilu 1971, berkat hubungan yang dibangun oleh Subhchan Z.E. dengan eksponen Orde Baru lainnya, NU masih tetap merupakan faktor penting dalam percaturan politik nasional. Berakhirnya masa Soekarno mengakhiri pula kegemilangan perajalanan organisasi NU yang pada masa itu juga berperan sebagai partai politik.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik. Menurut Duverger (1998:57) sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena kekuasaan di dalam setiap pengelompokan manusia, bukan hanya di dalam Negara (nation state). Masing-masing kelompok manusia terwujud dalam suatu struktur, yaitu suatu kerangka dimana sapek-aspek konflik dan integrasi dari kekuasaan saling memainkan peran. Struktur ini disebut struktur politik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peranan NU yang secara struktur dan fisik dan struktur sosial semakin luas selama masa Demokrasi Terpimpin, sehingga peran NU dalam politik integrasi di bawah kebijakan politik saat itu. Ini membawa peranan NU mencapai posisi penting pada masa demokrasi terpimpin. NU juga mampu bersaing dan bekerja sama dengan para pemeran demokrasi terpimpin lainnya salah satunya adalah angkatan darat.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuatan kebijakan. Laswell (2001:260-261) mengemukakan bahwa pembuatan kebijakan dalam analisa politik lebih mengarah pada proses pembuatan keputusan. Menurutnya suatu keputusan merupakan hasil dari suatu pertentangan yang membentuk kekuasaan atau merupakan hasil dari interaksi dalam arena politik. Teori pembuatan kebijakan ini digunakan untuk menganalisis segala pembuatan keputusan oleh pemerintah pada masa dmokrasi terpimpin. Terkait pada arah kebijakan politik demokrasi terpimpin

yang menginginkan pembangunan di segala bidang baik bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dengan menempatkan NU dalam pemerintahan.



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara yang teratur untuk memperoleh suatu data atau informasi yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk menetapkan masalah, dan untuk mengembangkan suatu bidang ilmu pengetahuan yang akan dilakukan secara kritis, sistematis dan cermat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau yang memperhatikan kausalitas dan aktivitas manusia dalam urutan kejadian dan latar waktu tertentu. Terdapat empat langkah dalam metode sejarah yaitu : 1) heuristik, 2) kritik, 3) interpretasi, 4) historiografi (Notosusanto,1971:18)

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah Heuristik. Heuristik yaitu upaya untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber – sumber sejarah yang terkait dengan penulisan skripsi tentang “Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965.

Langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara studi pustaka melalui sumber-sumber tertulis berupa arsip dan dokumen, buku-buku, dan penelitian lain yang relevan. Penulis menelusuri sumber tertulis yang diperoleh dari Perpustakaan Pendidikan Sejarah, Perpustakaan Pusat Universitas Jember, Perpustakaan Umum Jember dan beberapa koleksi pribadi. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber sekunder yang salah satunya adalah Ali Haidar terbit tahun 1998 yang berjudul “*Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*” (pendekatan fikih dan politik) dan beberapa buku penunjang lainnya.

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber. Kritik adalah suatu kegiatan menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik. Dalam tahap kritik ini penulis melalui dua cara yakni, 1) Kritik Ekstern merupakan kegiatan meneliti keaslian data, yang dilakukan dengan cara melihat dari segi fisiknya saja dengan melihat nama pengarang, tahun terbit, judul buku, kertas yang digunakan, gaya

bahasa sehingga dapat dipastikan keasliannya. 2) Kritik Intern merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran sumber. Penulis melakukan kritik intern dengan cara melakukan perbandingan antara buku satu dengan buku yang lain sehingga menghasilkan fakta. Jadi penulis melakukan penyelidikan terhadap substansi (isi) dengan cara membanding-bandingkan agar mendapat keterangan yang benar-benar valid.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Penulis melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah mengenai peran dan partisipasi Nahdatul Ulama dalam politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 dengan cara membandingkan dan menghubungkan makna dari fakta-fakta tersebut dirangkai dan saling dihubungkan secara kronologis sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis dan logis. Proses analisis dan sintesis kajian untuk keperluan interpretasi akan lebih mudah dilakukan bila menggunakan beberapa pendekatan dan teori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi politik sedangkan teori yang digunakan adalah teori

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah Historiografi. Historiografi merupakan klimaks dari penelitian sejarah dan merupakan bagian dari metode sejarah yaitu menuliskan hasil interpretasi atas fakta – fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis. Penyajian dalam hasil penelitian ini adalah penyusunan kisah sejarah dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan sistematika penulis yang terdiri dari Bab 1, berisi bab pendahuluan yang berisi tentang sub bab latar belakang permasalahan; penegasan pengertian judul; ruang lingkup permasalahan; rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965 dimuat dalam bab 2 tinjauan pustaka. Sedangkan tata cara memperoleh data, analisis data, merekonstruksi fakta-fakta sejarah dalam sebuah karya ilmiah yang menarik dan bertujuan membantu proses penelitian sejarah dimuat dalam bab 3 Metode penelitian yang di dalamnya memuat empat tahap penelitian sejarah yakni heuristik, kritik,

interpretasi dan historiografi. Pada bab 4 berisi Konsep dan Pandangan Demokrasi Terpimpin. Bab 5. Persaingan dan Kerja Sama Politik NU pada Masa Demokrasi Terpimpin. Bab 6. Peranan Nahdatul Ulama dalam sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965. Bab 7. Berisi penutup meliputi simpulan dan saran.



## BAB 4. KONSEP DAN PANDANGAN DEMOKRASI TERPIMPIN

### 4.1 Konsep Demokrasi Terpimpin

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante serta adanya beberapa peristiwa-peristiwa politik yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 1959, telah mendorong Presiden Soekarno untuk sampai kepada sebuah kesimpulan. Bahwa telah muncul suatu keadaan yang membahayakan kehidupan negara. Dengan adanya kesimpulan tersebut, maka Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi Dekrit Presiden yang berisi tentang pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yaitu Demokrasi Terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) adalah suatu fase politik dan realitas ketatanegaraan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang dilaksanakan antara tahun 1959-1965, atau tepatnya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga gagal kudeta 30 September (G30S) 1965. Suatu masa yang tidak lebih lama dari masa Demokrasi Parlementer yang sebelumnya pernah dijalankan di Indonesia. Hingga akhirnya, Demokrasi Terpimpin identik dengan Soekarno (Maarif, 1998:177).

Dekrit yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Dekrit Presiden 5 Juli juga dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Kekuatan dekrit tersebut tidak hanya berasal dari sambutan sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dari dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan Komando Strategi Angkatan Darat. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden maka Kabinet Djuanda dibubarkan dan resmi diganti dengan Kabinet Kerja pada tanggal 9 Juli 1959. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama (Poesponegoro, 1993:311)

Terlepas dari pelaksanaannya yang dianggap otoriter. Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam politik Indonesia pada pertengahan tahun 1950. Untuk menggantikan pertentangan yang terjadi diantara partai-partai di dalam parlemen maka suatu sistem diciptakan kembali, dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari Angkatan Darat. Akan tetapi Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer. Dari kelompok sipil ini yang paling utama adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan peranan dari golongan agama yang diwakili oleh Nahdatul Ulama, yang selanjutnya tergabung dalam poros Nasakom-Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin. (Crouch,1999:44).

Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapkan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti MANIPOL-USDEK dan Nasakom. Dalam usahanya untuk mendapatkan dukungan yang luas dalam kampanye melawan Belanda di Irian Barat dan Inggris di Malaysia. Soekarno menyatakan bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu pimpinan atau kekuatan-kekuatan yang sedang tumbuh di dunia. Yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Neokolim (Neokolonialis, Kolonialis dan Imperialis), Soekarno juga ingin menciptakan suatu kesadaran akan tujuan nasional dalam mengatasi persaingan politik yang akan mengancam kelangsungan hidup sistem Demokrasi Terpimpin.

Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada bulan Juli 1960, Presiden Soekarno adalah pemegang inisiatif politik, terutama dengan tindakan dan janji-janjinya yang langsung ditujukan kepada pembentukan kembali

struktur konstitusional, namun di sisi lain tujuannya kemudian mulai bergeser kepada tindakan simbolis dan ritual, khususnya kepada perumusan ideologi yang disertai dengan gagasan-gagasannya. Dalam hal ini Presiden Soekarno menciptakan doktrin negara yang baru (Feith, 1995:79).

Masa Demokrasi Terpimpin waktu itu sudah menguasai komunikasi massa sejak pertengahan tahun 1958, sejak saat itu pula surat kabar atau majalah tidak berani terang-terangan mengecam Demokrasi Terpimpin. Bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan pidato kenegaraan yang sebagian besar berisi tentang alasan-alasan yang membenarkan mengapa harus kembali ke Undang- Undang Dasar 1945. Pidato ini sangat penting karena berkaitan dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Revolusioner tersebut. Tiga bulan setelah pidato kenegaraannya, Presiden Soekarno menyatakan naskah pidato itu menjadi “Manifesto Politik Republik Indonesia”. Bersamaan dengan itu pula Presiden mengesahkan rincian sistematikanya yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam pidato-pidatonya di awal tahun 1959, Presiden selalu mengatakan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945; kedua, sosialisme ala Indonesia; Ketiga, Demokrasi Terpimpin; keempat, Ekonomi Terpimpin; dan yang terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Dengan mengambil huruf pertama masing-masing gagasan itu maka muncullah singkatan USDEK. “Manifesto Politik Republik Indonesia” disingkat “MANIPOL”, dan ajaran baru itu dikenal dengan nama “MANIPOL-USDEK”(Feith, 1995:80)

MANIPOL-USDEK memiliki daya tarik bagi masyarakat politik pada waktu itu. Masyarakat politik yang dimaksud adalah masyarakat yang didominasi oleh pegawai negeri, dimana masyarakat tersebut selalu mendukung apa yang ditekankan oleh Presiden, misalnya mengenai kegotong-royongan yang menempatkan kepentingan nasional diatas kepentingan golongan dan pencapaian mufakat melalui jalan musyawarah yang dilakukan dengan penuh kesabaran. Ada dua sebab mengenai hal ini pertama, keselarasan dan kesetiakawanan merupakan nilai yang dijunjung

masyarakat-masyarakat Indonesia. Dan kedua, bangsa Indonesia benar-benar menyadari betapa beratnya kehidupan yang mereka rasakan akibat keterpecahbelahan mereka dalam tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik kepada gagasan bahwa apa yang diperlukan Indonesia dewasa ini adalah orang-orang yang berpikiran benar, berjiwa benar dan patriot sejati.

MANIPOL USDEK terletak pada kenyataan bahwa ideologi ini menyajikan sebuah arah baru. Masyarakat tidak begitu banyak tertarik pada makna dasar dari arah tersebut. Yang paling penting bagi masyarakat adalah presiden menawarkan sesuatu yang lebih baik pada saat terjadi ketidakjelasan arah yang dituju, dimana nilai-nilai dan pola-pola kognitif pada masa itu terus berubah dan saling berbenturan, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk mencari perumusan yang sistematis mengenai apa yang baik dalam politik.

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus tahun 1960 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Presiden Soekarno mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar Demokrasi Terpimpin adalah: (1) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan Negara dan (2) Tiap-tiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dalam masyarakat bangsa dan Negara.

Sedangkan dalam amanatnya pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno yang sekaligus menjadi presiden pertama Republik Indonesia pertama tersebut memberitahukan bahwa salah satu definisi tentang “Demokrasi Terpimpin” adalah demokrasi atau dalam UUD 1945 dikatakan demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sedangkan dalam kesempatan lain Soekarno menjelaskan, “Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki liberalisme, tanpa otokrasi diktator”(Maarif, 1998:183).

Soekarno dengan konsep Demokrasi Terpimpinnya menilai Demokrasi Barat yang bersifat liberal tidak dapat menciptakan kestabilan politik. Menurut Soekarno, penerapan sistim Demokrasi Barat menyebabkan tidak terbentuknya pemerintahan kuat yang dibutuhkan untuk membangun bangsa Indonesia. Pandangan Soekarno terhadap sistem liberal ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kehidupan partai

politik di Indonesia. Partai politik dianggap sebagai sebuah penyakit yang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan. Penyakit yang dimaksud disini adalah sesuatu hal yang menyebabkan tidak adanya rasa kesatuan dalam membangun Indonesia. Partai-partai yang ada pada waktu itu berjumlah sebanyak 40 partai dan ditekan oleh Soekarno untuk dibubarkan. Akan tetapi Demokrasi Terpimpin masih menyisakan sejumlah partai untuk berkembang. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan Soekarno akan keseimbangan kekuatan yang seimbang dengan kalangan militer. Beberapa partai dapat dimanfaatkan oleh Soekarno untuk dijadikan sebagai penyeimbang.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, parlemen sudah tidak mempunyai kekuatan yang nyata. Sementara itu partai-partai lainnya dihimpun oleh Soekarno dengan menggunakan suatu ikatan kerjasama yang didominasi oleh sebuah ideologi. Dengan demikian partai-partai itu tidak dapat lagi menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional terutama dalam tahun-tahun awal Demokrasi Terpimpin. Partai politik seperti NU dan PNI dapat dikatakan pergerakannya dilumpuhkan karena ditekan oleh presiden yang menuntut agar kedua partai tersebut mendukung apa yang telah dilakukan oleh presiden. Sebaliknya, di sisi lain, golongan komunis memainkan peranan penting dan temperamen yang tinggi. Pada dasarnya sepuluh partai politik yang ada tetap diperkenankan untuk hidup, termasuk NU dan PNI, tetapi semua wajib menyatakan dukungan terhadap gagasan presiden pada segala kesempatan serta mengemukakan ide-ide mereka sendiri dalam suatu bentuk yang sesuai dengan doktrin presiden (Karim,1993:140).

#### **4.2 Demokrasi Terpimpin dan Partai Politik**

Pada masa Demokrasi Terpimpin partai politik dalam pergerakannya tidak boleh bertolak belakang dengan konsepsi Soekarno. Penetapan Presiden (Penpres) adalah cara yang digunakan oleh Soekarno untuk melumpuhkan apa saja yang dinilainya menghalangi jalannya revolusi. Bagi Soekarno Demokrasi Terpimpin

dianggap mengandung nilai-nilai asli Indonesia akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaannya lebih mengarah kepada praktek pemerintahan yang otoriter. Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1955 yang di dalamnya terdiri dari partai-partai pemenang pemilihan umum, dibubarkan. Beberapa partai yang dianggap terlibat dalam pemberontakan sepanjang tahun 1950 seperti Masyumi dan PSI juga dibubarkan dengan paksa, bahkan pada tahun 1961 semua partai politik kecuali 9 partai yang dianggap dapat menyokong atau dapat dikendalikan dibubarkan pula. (Karim, 1993:142)

Dalam menggambarkan kiprah partai politik di percaturan politik nasional, terdapat satu partai yang pergerakan serta peranannya begitu dominan yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa itu kekuasaan berpusat pada tiga kekuatan yaitu Soekarno, TNI-Angkatan Darat dan PKI. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran mengenai kehidupan partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin, pergerakan PKI pada masa ini tidak dapat dilepaskan begitu saja. PKI di bawah pemimpin mudanya yaitu Aidit dan Nyoto menghimpun massa dengan intensif dan segala cara baik secara etis maupun tidak etis. Pergerakan PKI yang sangat progresif terutama dalam pengumpulan massa membuat PKI menjadi sebuah partai besar pada akhir periode Demokrasi Terpimpin. Pada tahun 1965, PKI telah memiliki anggota sebanyak 3 juta orang ditambah dengan 17 juta pengikut yang menjadi anggota organisasi pendukungnya, sehingga di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya non-komunis, PKI merupakan partai terbesar (Gaffar, 2002:61-67).

Hubungan yang terjadi antara PKI dan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan merupakan hubungan timbal balik. Dikatakan hubungan timbal balik karena pada masa itu pula PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Terlebih lagi pada tahun 1963, MPRS mengangkat Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup yang tentunya keputusan ini mendapat dukungan dari PKI. Sementara itu salah satu unsur kekuatan lain dalam Demokrasi Terpimpin, berasal dari golongan TNI-Angkatan Darat. TNI-Angkatan Darat yang curiga karena melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan

Soekarno, terutama pada saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan dari Soekarno. Menurut TNI-Angkatan Darat hal ini dianggap sebagai sebuah upaya untuk menyaingi kekuatan TNI-Angkatan Darat dan memecah belah militer untuk dapat dikuasai. Kerenggangan hubungan antara Soekarno dengan pemimpin militer pada akhirnya muncul, yang selanjutnya keadaan ini dimanfaatkan oleh PKI untuk mencapai tujuan politiknya. Dari sinilah PKI melakukan sikap militan yang radikal melalui agitasi dan tekanan-tekanan politiknya yang semakin meningkat serta membuat jurang permusuhan yang terjadi semakin melebar. Konflik yang terjadi itu kemudian mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September tahun 1965 (Gaffar, 2002:65).

Partai politik pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami pembubaran secara paksa. Pembubaran tersebut pada umumnya dilakukan dengan cara diterapkannya Penerapan Presiden (Penpres) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1959. Peraturan tersebut menyangkut persyaratan partai, sebagai berikut : (1) Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, (2) Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya, (3) Menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah, (4) Partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di seperempat jumlah daerah tingkat I dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya seperempat dari jumlah daerah tingkat II seluruh wilayah Republik Indonesia, (5) Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai, dan (6) Presiden berhak membubarkan partai, yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggotanya partai, yang membantu pemberontakan (Karim, 1993:148)

Sampai dengan tahun 1961, hanya ada 10 partai yang diakui dan dianggap memenuhi prasyarat di atas. Melalui Keppres No. 128 tahun 1961, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII dan IPKI. Sedangkan Keppres No. 129 tahun 1961 menolak untuk diakui PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo dan Partai Rakyat Nasional

Djodi Goondokusumo. Selanjutnya melalui Keppres No. 440 tahun 1961 telah pula diakui Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti).

Kehidupan partai-partai politik di masa Demokrasi Terpimpin. Partai-partai tersebut hampir tidak bisa memainkan perannya dalam pentas perpolitikan nasional pada masa itu. Hal ini dimungkinkan antara lain oleh peran Soekarno yang amat dominan dalam menjalankan pemerintahannya dengan cirinya utamanya yang sangat otoriter pada waktu itu di era demokrasi terpimpin.

#### **4.3 Pandangan K.H Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin**

Salah satu pimpinan Islam yang secara tegas menerima dan mendukung gagasan Soekarno untuk mendukung Demokrasi Terpimpin adalah K.H. Idham Chalid. Sebagai seorang yang dibesarkan di kalangan tradisionalis dan mendapatkan pendidikan modern, Idham memiliki pandangan visioner dan kepercayaan diri yang kukuh. Selain itu langkah-langkah politiknya tak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip dan etika politik Sunni yang telah dipakai oleh NU. Sikap ini didasarkan pada beberapa prinsip dalam hukum Islam, yang salah satunya adalah *mala yudraku kulluh la yutraku kulluh*, (kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semua).

Bagi Idham dalam berpolitik seharusnya berorientasi kepada kemaslahatan dan berguna bagi orang banyak, serta tidak terlalu dalam bersikap. Idham juga menggambarkan seorang politisi yang baik maka harus politisi tersebut harus memahami “filosofi air”. Harus mudah meresap dan menyesuaikan diri. Air apabila dimasukkan pada sebuah gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke ember akan berbentuk ember. Apabila dibelah dengan benda tajam, ia terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk asalnya. Dan air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastis mencari resapan. Bila dibuatkan kanal dia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan

mahluk di dunia. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup (al Anbiya : 30)” (Muhajir, 2007:56).

Di saat pemimpin Islam lainnya menolak konsepsi dari Soekarno tersebut, Idham berusaha mencari penyesuaian dan mempertemukan antara Islam Demokrasi Terpimpin. Terdapat dua hal dalam pandangan Idham Chalid tentang Demokrasi Terpimpin, pertama, ketika dia menyatakan bahwa musyawarah (*syura*) adalah bukti adanya demokrasi dalam Islam atau dengan kata lain *syura* adalah demokrasi dalam Islam. Kedua, ketika Idham menyamakan beberapa hal dalam *syura* dengan Demokrasi Terpimpin. Idham menganggap *syura* (musyawarah) sama dengan demokrasi, dengan kata lain Demokrasi Terpimpin sama halnya dengan musyawarah terpimpin.

Idham menjadi pendukung Soekarno, terutama di masa Demokrasi Terpimpin dilaksanakan, demi menjaga agar NU dan dirinya terus bisa bermain di tengah-tengah arena politik, walaupun bukan menjadi pemain utama bahkan terhimpit di antara tiga kekuatan yang mendominasi diantaranya adalah Soekarno, militer, dan PKI. Pada masa itu, Idham menduduki posisi sebagai anggota DPA, dan Front Nasional dan wakil ketua MPRS.

Ditegaskan oleh M. Haidar Ali (1998: 168) dalam bukunya yang berjudul” Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia”, dalam berbagai hal NU mampu tampil dengan menggunakan posisi politiknya sebagai “orang dalam pemerintah” untuk melawan agitasi dan aksi sepihak PKI di banyak tempat, hal ini juga diakui oleh Njono, dia adalah seorang gembong PKI yang mengatakan bahwa “ NU sangat menyulitkan PKI karena posisinya yang dekat dengan Soekarno”.

Latar belakangnya yang seorang guru membuatnya santun dalam berpolitik, mampu tenang berhadapan dan “bekerjasama” dengan musuh politik seperti Aidit dan PKI. Idham juga sangat dipengaruhi Wahab Chasbullah, Rais ‘Aam Nahdatul Ulama, yang perannya sangat kuat dalam pembentukan karakter NU dan arah kebijakan partai. Dominasi Wahab dalam partai selama akhir tahun 1950 memperlihatkan bahwa sikap pragmatis tidak hanya wajar secara politik, tetapi dibenarkan secara

keagamaan. Selain menghormati para guru dan kiai, Idham sangat menghormati dan menghargai para ulama dan karenanya mampu bertahan lama di NU. Ia juga sering digambarkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, sikapnya luwes dan cenderung menghindari konflik yang tidak perlu. Ia juga memiliki kepekaan dalam berpolitik yang baik, pintar “membaca angin” dan karenanya cenderung pragmatis dalam bersikap. Perjalanan politiknya sering digambarkan seperti “mendayung dalam taufan” atau “meniti buih” (Muhajir,2007:57)



## **BAB 5. PERSAINGAN DAN KERJA SAMA POLITIK NU PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**

### **5.1 Polarisasi Kekuatan Dalam Demokrasi Terpimpin**

Dekret Presiden 5 Juli 1959 membawa perubahan fundamental terhadap tatanan politik di Indonesia, karena di dalamnya dinyatakan bahwa selain konstituante dibubarkan, yang lebih penting lagi adalah dengan diberlakukannya kembali UUD 1945. Dengan demikian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Kedudukan politik Presiden secara resmi juga menjadi lebih kuat, karena UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Dalam hal ini Soekarno mampu mewujudkan gagasan-gagasan politik yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu membangun sistem politik Demokrasi Terpimpin.

Sementara itu sejak periode peralihan menuju terbentuknya sistem Demokrasi Terpimpin partai-partai politik tidak lagi menjadi pemeran utama di atas panggung politik Indonesia. Setelah Masyumi dan PSI kehilangan popularitasnya karena keterlibatan beberapa pimpinan pusatnya dalam pemberontakan PRRI/Permesta, partai-partai politik lain menjadi semakin berhati-hati. Partai-partai tersebut juga kehilangan peran serta dalam menentukan perkembangan politik. Situasi yang sulit ini tidak berlaku bagi PKI, meskipun dalam melaksanakan kegiatan politiknya partai ini sering menjadi sasaran pelarangan oleh pihak Angkatan Darat (AD). Karena PKI tidak terlibat dalam kabinet-kabinet yang memerintah pada periode Demokrasi Parlementer maka partai ini lolos dari kecaman-kecaman terhadap segala sesuatu yang berunsur liberal yang terdapat dalam sistem Demokrasi Parlementer. Maka dalam hal ini PKI tetap dapat mempertahankan popularitas dan semangat juangnya yang tinggi untuk masuk ke dalam tatanan politik yang baru yaitu masa Demokrasi Terpimpin. (Sundhaussen, 1998:184-205)

Kekuatan politik lain yang juga meningkat popularitasnya adalah TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat tampil untuk menjadi tumpuan dan harapan

pada saat itu. Ketika pemerintahan yang dikuasai oleh partai-partai politik semakin jauh terlibat dalam konflik-konflik kepentingan. Sementara kedaulatan negara yang terancam oleh berbagai pergolakan daerah telah membuka jalan bagi tentara untuk berperan lebih besar dalam perpolitikan nasional. Landasan untuk itu telah tersedia ketika diberlakukan keadaan darurat perang pada bulan Maret 1957. Dengan adanya keadaan darurat tersebut maka semakin menguatkan posisi Angkatan Darat sebagai salah satu kekuatan politik yang penting dan siap untuk memainkan peranan yang strategis dalam sistem Demokrasi Terpimpin. (Sundhaussen, 1998:224)

Sebagai dua kekuatan partai politik besar yang tersisa selain PKI dan PNI. NU mengalami demoralisasi ketika tatanan Demokrasi Terpimpin dimulai. Kondisi ini timbul akibat suasana yang sedang diliputi perasaan anti partai-partai pada waktu itu. Mereka tidak mampu menghimpun kekuatan untuk mengambil inisiatif mereka sendiri. Upaya mereka lebih ditujukan untuk mempertahankan keberadaannya di tengah tatanan politik yang sedang berubah, maka dalam memahami tatanan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, PNI, NU dan berbagai kelompok politik lainnya tidak boleh dikesampingkan begitu saja (Sundhaussen, 1998 : 184-205).

Periode 1959-1962 ditandai dengan semakin lemahnya kekuatan partai-partai politik menghadapi dua pusat kekuasaan yang semakin kuat, yaitu Presiden Soekarno dan TNI-Angkatan Darat. Dengan kekuasaan yang besar di bawah keadaan darurat perang dan UUD 1945. Soekarno dan TNI-Angkatan Darat bekerja sama untuk mengurangi kekuasaan partai-partai politik dan membatasi dengan sangat ketat segala kegiatannya. Dengan dihapuskannya perwakilan partai dalam “Kabinet Kerja” (yang terbentuk dalam satu minggu setelah Dekrit 5 Juli 1959) dan dibubarkannya parlemen hasil pemilu 1955 tanggal 5 Maret 1960, maka telah menutup kemungkinan bagi partai-partai politik untuk membuat keputusan besar di tingkat nasional. (Sundhaussen, 1998:256). Meskipun demikian partai-partai politik tetap memainkan peranan sebagai unsur penyeimbang di antara tiga pemegang inisiatif politik yang sedang naik peranannya yaitu; Presiden Soekarno, TNI-Angkatan Darat dan PKI. Presiden Soekarno masih membutuhkan dukungan dari partai-partai politik dan para

pengikut mereka di lingkungan birokrasi. Dalam keadaan ini PNI paling banyak mengambil keuntungan. Sementara NU yang selalu kekurangan tenaga profesional mendapat kesulitan untuk menempatkan anggota-anggotanya di luar Departemen Agama, sedangkan PKI yang baru mempunyai peran penting dalam periode 1963-1965, selalu mendapat rintangan dari Nahdatul Ulama dan Angkatan Darat untuk tertibat di dalam birokrasi dan pemerintahan (Feith, 1995:139-146).

Setelah pertengahan tahun 1960 PNI, NU dan PKI lebih kelihatan menjadi sekutu Soekarno daripada lawan. Kerja sama antara partai-partai tersebut dengan Soekarno dan satu sama lainnya dirumuskan oleh Soekarno dalam semboyan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis). Semboyan NASAKOM semakin hari semakin ditekankan oleh Soekarno. Sebagai perwujudannya aliansi NASAKOM harus hadir sebagai wakil aspirasi dari aliran-aliran politik utama yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, eksponen Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama diwakili NU dan Komunis diwakili PKI. Dengan ini PNI, NU dan PKI memiliki kebenaran ideologis untuk turut berperan dalam kelangsungan sistem Demokrasi Terpimpin.

## **5.2 Tanggapan NU Terhadap Sistem Demokrasi Terpimpin**

Berbagai tanggapan NU terhadap sistem Demokrasi Terpimpin dapat dilihat sejak masa transisi menuju periode tersebut. Berbagai krisis politik dalam masa peralihan tersebut muncul secara bergantian antara tahun 1957 hingga tahun 1960. Seperti pada saat Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya pada tanggal 21 Februari tahun 1957 yang disusul dengan pembentukan Kabinet Karya pada bulan April tahun 1957 dan disusul oleh pembentukan Dewan Nasional sebulan kemudian. Krisis berikutnya adalah Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang isinya pemberlakuan kembali UUD 1945 dan pembubaran konstituante. Krisis penting lainnya adalah ketika parlemen hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan oleh presiden pada tanggal 5 Maret 1960. Alasannya adalah karena parlemen menolak Rancangan Anggaran Belanja Negara dan tidak mau memperbaharui komposisinya secara

sukarela. Sebagai gantinya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) pada bulan Juni tahun 1960 yang keanggotaannya mencakup golongan fungsional. (Sundhaussen, 1998 :258)

Di akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960, kepemimpinan NU didominasi oleh para kiai dan politisi dengan karakter yang sangat berhati-hati serta mempunyai kemauan untuk berkompromi dalam berpolitik. Tokoh yang paling menonjol mewakili karakter ini adalah K.H Wahab Chasbullah yang menjabat sebagai Rois Aam Syuriah NU yang juga memiliki kharisma paling kuat diantara jajaran para kiai lainnya. Figur penting lainnya adalah dua kepemimpinan dalam Tanfiziyah yaitu K.H. Idham Chalid sebagai ketua umum dan Sekertarisnya yaitu Saifuddin Zuhri. Kedua tokoh ini mulai bekerja sama dalam Tanfiziyah sejak tahun 1956. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya yang masuk ke dalam kelompok ini antara lain adalah K.H. Masjkur, K.H. Muslich, Zainul Arifin dan Djamaluddin Malik. Mereka ini orang-orang yang paling banyak mempengaruhi kebijakan dan cara yang ditempuh Partai NU selama periode Demokrasi Terpimpin.

Politik Indonesia pada tahun 1957 yang meningkat mengakibatkan jatuhnya Kabinet Ali II. Presiden Soekarno segera memberlakukan keadaan darurat perang untuk mencegah disintegrasi dan mengemukakan konsepsinya pada tanggal 21 Februari 1957 sebagai alternatif yang ditawarkan untuk mengatasi krisis politik yang berlangsung. Partai-partai Islam mengemukakan tanggapan mereka dengan menolak konsepsi Presiden. Kiai M. Dahlan (Rois ke 2 Nahdatul Ulama) dan Imron Rosjadi (Ketua Pemuda Anshor) adalah para pemimpin NU yang sejak awal menentang konsepsi presiden dan gagasan Demokrasi Terpimpin yang terkandung di dalamnya. Mereka khawatir jika pemikiran presiden diterapkan maka akan dapat menimbulkan diktator. Imron Rosjadi menegaskan bahwa diktator berlawanan dengan Islam dan sistem pemerintahan harus dikembangkan dengan terlepas dari siapa yang menjadi presiden. Bahkan Imron Rosjadi juga mengatakan bahwa Dewan Nasional dibentuk hanya untuk keperluan Soekarno (Noer, 1987:353).

Sedangkan keberatan NU yang utama terhadap Konsepsi Presiden adalah rencana menyertakan PKI dalam Kabinet Gotong Royong yang akan dibentuk. Dalam menghadapi sikap NU yang keberatan tersebut maka Presiden tetap meminta PKI untuk ikut serta dalam kabinet sekalipun NU menolak. Demi menjaga nama baiknya Presiden Soekarno mengusulkan agar pembentukan Dewan Nasional yang sifatnya hanya memberikan nasehat agar diterima oleh NU. Dengan adanya permintaan ini delegasi NU yang terdiri dari K.H.Wahab Chasbullah, K.H. Masjkur, Idham Chalid dan Zainul Arifin menyatakan akan mempertimbangkan kembali usulan presiden.

Usulan tersebut kemudian dibicarakan dalam rapat pleno Partai Besar Nahdatul Ulama pada tanggal 9-10 Maret tahun 1957 yang akhirnya memutuskan untuk menyetujui dibentuknya Dewan Nasional dan menyetujui pula dibentuknya Dewan Perancang Nasional yang diketuai oleh Mohammad Hatta serta menolak keikutsertaan PKI di dalam kabinet.

Latar belakang penerimaan ini tidak terlepas dari landasan fiqih (hukum agama) yang digunakan Kiai Wahab dan K.H. Idham Chalid dan tokoh-tokoh lain. Dengan cara menerapkan fiqih secara kontekstual dalam menghadapi realitas politik. Dalam kaitan ini dari banyaknya dalil-dalil fiqih yang dapat dijadikan landasan maka terdapat tiga dalil yang mewarnai kebijaksanaan politik NU dan masa transisi hingga masuk ke periode Demokrasi Terpimpin yaitu; (1) Menghindari kerusakan harus didahulukan atas melaksanakan kebaikan, (2) memilih bahaya yang paling kecil diantara kemungkinan sejumlah bahaya yang akan timbul dan (3) Apa yang tidak tercapai sepenuhnya janganlah ditinggal atau dibuang hasil yang cuma sebagian. Pendekatan politik yang menggunakan dalil-dalil fiqih diatas telah memperlihatkan keluwesan sikap politik Nahdatul Ulama. Dengan kemampuan mengelak dalam menghadapi masalah untuk dipecahkan secara fragmentaris, namun tetap berpijak dalam kerangka “ideologi” yang dianut Nahdatul Ulama (Fealy,1994:93-94).

Keinginan menghindari bahaya terhadap partai dan umat ada dua hal penting yang menjadi perhatian para pemimpin Nahdatul Ulama. Faktor pertama, munculnya Presiden Soekarno dan Angkatan Darat sebagai kekuatan politik sejak tahun 1957

yang diikuti dengan surutnya peranan partai-partai politik. Sikap menentang secara keras terhadap dua kekuatan politik yang baru tumbuh ini tidak hanya sia-sia tetapi juga sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup partai. Karena menentang proses yang sedang berlangsung akan mendatangkan konflik yang menjadi sasaran tekanan dan intimidasi. Bagi Nahdatul Ulama oposisi hanya mengundang otoriter yang semakin keras dan pada akhirnya merupakan kerugian besar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Faktor kedua, membendung pengaruh PKI yang akan masuk kedalam pemerintahan. Jika Nahdatul Ulama menolak berperan dalam tatanan politik yang baru maka PKI akan menjadi lebih dominan dibanding kekuatan Islam di dalam mengendalikan pemerintahan. Maka dengan tujuan untuk menjaga agar PKI tetap berada di luar pemerintahan. Nahdatul Ulama menggunakan posisinya sebagai “orang dalam” untuk membendung sejauh mungkin keterlibatan PKI di dalam pemerintahan. Sedangkan karakter Nahdatul Ulama yang lain adalah reaktif yang terlihat dari tanggapannya ketika dekrit presiden 5 Juli diumumkan. Dengan sangat berhati-hati kepemimpinan Nahdatul Ulama memilih “bersikap diam” selama beberapa minggu untuk melihat tanggapan masyarakat terhadap dekrit presiden, sebelum akhirnya memberikan pernyataan resmi untuk dapat menerimanya (Fealy, 1994:94)

Bagi Nahdatul Ulama secara konstektual Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia pada saat itu adalah Demokrasi Terpimpin. NU menjadikan sifat kepemimpinan Nahdatul Ulama yang luwes sebagai dasar mereka untuk menerima sistem Demokrasi Terpimpin. Namun tidak selamanya kepemimpinan Nahdatul Ulama selalu satu suara dalam menghadapi krisis politik. Seperti dalam menghadapi pembubaran kabinet hasil pemilu tahun 1955 dan pembentukan Kabinet Gotong Royong pada bulan Juni tahun 1960 muncul pendapat setuju dan tidak setuju. Pihak yang tidak setuju antara lain adalah K.H. Bisri Syamsuri, K.H.M. Dahlan, K.H. Imron Rosjadi dan Ahmad Siddiq yang beranggapan bahwa pembubaran kabinet hasil pilihan rakyat dan menggantinya dengan kabinet baru tanpa pemilu menurut suatu dalil fiqih adalah *ghasab* atau dengan kata lain menurut mereka adalah melakukan perampasan hak orang lain dan oleh karena itu

tidak sah. Mereka mengusulkan agar sidang Dewan Partai Nahdatul Ulama membicarakannya terlebih dahulu sikap apa yang akan diambil oleh Nahdatul Ulama terhadap masalah ini. Sementara itu KH. Wahab Chasbullah, K.H. Masjkur, K.H. Idham Chalid, Zainul Arifin, Saifiuddin Zuhri dan H. A. Sjaichu berada di pihak yang setuju. Mereka menerima pembentukan DPRGR dengan berlandaskan dua prinsip hukum *fiqih*. Prinsip pertama; *al-hajah yanzilu manzilata dharurah*, yang artinya bahwa kepala negara berwenang untuk membekukan lembaga-lembaga perwakilan, jika dinilai keadaan mendesak dan dapat menjadi keadaan darurat. Karena adanya pembekuan dengan sendirinya diperlukan penggantinya. Sementara pemilu tidak mungkin diselenggarakan. Kepala negara dapat menggunakan wewenangnya untuk menyusun lembaga perwakilan yang baru. Prinsip kedua, yaitu; *amar maruf nahi munkar* atau memerintahkan yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Prinsip ini wajib dilakukan dalam kondisi saat itu dikarenakan dalam melakukan sesuatu hal di luar forum yang tidak resmi akan membawa hasil yang tidak baik maka Kiai Wahab menganjurkan NU untuk masuk kedalam DPRGR sebelum terlambat (Maarif,1998:62).

Dalam sidang Dewan Partai akhirnya Nahdatul Ulama menerima DPRGR dengan suara mayoritas mutlak. Dengan syarat memperjuangkan adanya tambahan perwakilan umat Islam sehingga ada perimbangan dengan non-Islam. Syarat ini muncul dikarenakan adanya wakil Islam dalam DPRGR yang jumlahnya lebih kecil dibanding dengan wakil dari non-Islam. Anggota DPRGR yang berjumlah sebanyak 283 orang terdiri dari jumlah wakil Islam sebanyak 67 termasuk wakil partai dan golongan fungsional. Jumlah anggota DPR tahun 1955 sebanyak 257, wakil Islam 116 (NU 45, Masjumi 57, dan partai Islam lainnya 14).

Sebelumnya dalam menghadapi pembubaran kabinet hasil pemilu tahun 1955, berdirilah Liga Demokrasi pada tanggal 24 Maret 1960 untuk menentang tindakan Presiden Soekamo yang dinilai tidak konstitusional. Tujuan dari berdirinya Liga Demokrasi ini adalah untuk mempertahankan negara, agama dan masyarakat. Dalam usahanya tersebut liga ini berhasil memperoleh dukungan dari berbagai golongan,

termasuk dari kalangan militer, namun liga ini berusia pendek. Pada tahun 1961 liga ini dibubarkan dengan tuduhan karena bertentangan dengan Manipol. Dalam Liga ini bergabung pula dua tokoh NU yang selalu kritis terhadap sistem Demokrasi Terpimpin, yaitu, K.H.M. Dahlan dan Imron Rosjadi (Noer, 1987:401-402). Karena sikap oposisinya yang konsisiten, pada tahun 1962 Imron Rosjadi bersama beberapa tokoh Masyumi dan PSI dimasukkan kedalam tahanan pemerintah. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa anggota-anggota Nahdatul Ulama dapat menerima sistem Demokrasi Terpimpin, namun di sisi lain masih ada anggota-anggota NU yang bersikap kritis terhadap sistem tersebut.

### **5.3 Kiprah NU Dalam Berbagai Lembaga Politik**

Pidato Presiden Soekarno pada hari ulang tahun Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1960 menjadi peristiwa yang penting dalam perkembangan Demokrasi Terpimpin. Dalam pidatonya tersebut presiden menyarankan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Badan Perancang Nasional, Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Front Nasional. Dari semua lembaga politik ini hanya dua yang tercantum dalam UUD 1945, yaitu DPA dan MPR. Sedangkan DPR hasil pemilu tahun 1955 telah dibubarkan pada bulan Maret tahun 1960. Dan sebagai gantinya diganti dengan DPRGR pada bulan Juni tahun 1960. Pada bulan Juli, Presiden mengeluarkan ketetapan mengenai penyederhanaan partai-partai yang memuat aturan bahwa 150.000 anggota dan 65 cabang partai dinyatakan sebagai syarat minimal untuk tetap menjadi partai politik (Sundhaussen,1998:258 ).

Semua rangkaian tindakan politik Soekarno ini mendapat dukungan dari TNI Angkatan Darat. Keduanya dapat bekerja sama dalam hal mengurangi peranan partai-partai politik karena memiliki beberapa tujuan yang sama yaitu untuk “menghancurkan” semua lembaga politik dari masa Demokrasi Parlementer yang mereka anggap sebagai akar dan segala ketidakstabilan politik pada tahun 1950. Soekarno dan TNI-Angkatan Darat saat itu merasa berhak untuk menjalankan

pemerintahan secara langsung, setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada partai-partai politik. Sebagai pelaku langsung dan pengembal amanat revolusi kemerdekaan mereka merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut sesuai dengan pendapat masing-masing.

Sejak adanya pidato presiden pada ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus tahun 1960, tidak ada lagi usaha nyata dari Presiden maupun TNI-Angkatan Darat untuk memperlemah partai-partai. Dari pihak partai-partai juga tidak ada perlawanan penting secara terbuka, karena lebih disibukkan oleh konsolidasi internal menghadapi tatanan politik yang baru. Redanya krisis politik ini dikarenakan tidak adanya lagi bagian-bagian liberal dalam sistem parlementer yang akan dihancurkan oleh presiden atau akan dipertahankan oleh partai-partai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga politik dari Demokrasi Terpimpin telah terbentuk.

DPRGR yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan partai serta golongan fungsional yang diantaranya adalah tentara, polisi, buruh, petani, ulama, pemuda, wanita, intelektual, dan pendidik. Jumlah keseluruhan anggotanya 283 orang, dengan 129 mewakili partai-partai dan 154 mewakili golongan fungsional. Komposisi DPRGR disusun oleh Presiden Soekarno bersama-sama dengan K.H. Idham Chalid dari Nahdatul Ulama, Suwiryono dari PNI, Aidit dari PKI, Ruslan Abdulgani yang menjabat sebagai ketua DPAS serta salah satu perwakilan dari Angkatan Darat. Dalam pertemuan di Tampak Siring pada bulan Maret tahun 1960 Nahdatul Ulama menerima hasil pertemuan Tampak Siring karena dipandang sebagai alternatif sementara yang dapat diterima karena masih melibatkan partai-partai politik. Sementara itu Nahdatul Ulama juga masih tetap menuntut agar diselenggarakan pemilihan umum untuk dapat membentuk parlemen yang representative (Ali, 1998:161).

Adanya perdebatan pro dan kontra dalam Nahdatul Ulama untuk menerima atau menolak DPRGR telah menyebabkan kontroversi, yang pada akhirnya Nahdatul Ulama memutuskan memberi kebebasan kepada anggotanya untuk menerima atau menolak penunjukkan sebagai anggota DPRGR. Sedangkan sikap Partai Nahdatul

Ulama cukup antusias untuk masuk ke lembaga parlemen baru tersebut. Dalam mewakili kepentingan dalam DPRGR. Nahdhtaul Ulama membentuk Fraksi Nahdatul Ulama atau disingkat Fraksi NU. Tugas yang dijalankannya adalah, “melaksanakan amanat Allah SWT dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat serta amanat partai Nahdatul Ulama. Sedangkan fungsi dan hubungannya dengan PBNU Peraturan Rumah Tangga Fraksi NU menyatakan “sebagai alat yang hidup dari PBNU dalam DPRRI. Dalam soal-soal yang sangat penting fraksi harus menghubungi PBNU terlebih dahulu, untuk menentukan sikapnya. Jumlah keseluruhan Fraksi NU 51 orang dan dipimpin oleh H. A. Sjaichu. Fraksi NU secara serius juga ikut memperjuangkan kepentingan umat Islam dan NU pada khususnya di dalam DPRGR. Setiap masalah politik sebelum dibawa ke parlemen, sebaiknya dibicarakan dahulu dalam pertemuan rutin Fraksi NU yang dilaksanakan setiap hari Kamis di kantor PBNU. Masalah-masalah yang dibicarakan dalam salah satu rapat tertutup tanggal 29 November 1961 antara lain, upaya menghilangkan salah paham antara golongan Islam dan Angkatan Perang (AD) dalam parlemen tentang pemerintahan daerah. Selain itu juga berbicara tentang pendekatan dari Angkatan Perang terhadap golongan Islam dalam upaya membendung pengaruh PKI. Keberadaan NU di DPRGR bukan hanya sekedar menjadi simbol bagi semua pemikiran, gagasan dan keinginan Presiden Soekarno. Ada misi *amar maruf nahi munkar* yang dipejuangkan oleh NU. Sedangkan bagi NU sendiri, sikap politiknya lebih merupakan akibat logis dan pragmatisme fiqih yang memberikan ragam kemungkinan pemecahan masalah dan sudut pendekatan kaidah kaidah dalil yang beragam (Noer, 1987:368).

Lembaga politik Demokrasi Terpimpin yang lain, yaitu Front Nasional. Lembaga yang akan digunakan sebagai tempat meleburnya partai-partai politik menjadi satu. Akan tetapi rencana ini tidak dapat diwujudkan dikarenakan pada pertengahan tahun 1960 Presiden mulai mengkhawatirkan bahwa Front Nasional yang kuat akan dikuasai oleh tentara. Nahdatul Ulama pada tanggal 6 Februari 1962 menyatakan secara langsung kepada Presiden Soekarno tentang kesiapannya untuk masuk ke dalam Front Nasional. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini semua

organisasi dalam lingkungan kekeluargaan Partai NU masuk secara bersama-sama menjadi anggota Front Nasional. Front yang berdiri pada tahun 1961 ini dalam perkembangannya tidak memainkan peranan yang penting dikarenakan kegiatannya yang hanya meliputi menggalang rakyat untuk mengikuti berbagai rapat umum, menyambut tamu-tamu asing atau tamu dan pusat ke daerah dan induktinasi massa (Feith, 1995:78).

Sedangkan dua lembaga politik lainnya, yaitu Dewan Perancang Nasional dan Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara. Kedua lembaga politik ini dinilai sebagai bagian eksekutif yang tidak memerlukan landasan dalam UUD 1945. Kedua lembaga ini merupakan cerminan dari keinginan pemerintah untuk menertibkan aparat administrasi negara. Demikian pula yang terjadi dengan MPRS dan DPA yang dipilih melalui pengangkatan Presiden. Meskipun Nahdatul Ulama turut menjadi anggota dalam lembaga-lembaga politik tersebut, namun keanggotaannya tidak cukup untuk mengangkat peranan lembaga-lembaga tersebut. Hakekat dan keberadaan lembaga-lembaga politik tersebut hanyalah sebagai alat kelengkapan dari gagasan Demokrasi Terpimpin, sementara kekuasaan yang terbesar secara pasti mengalir ke tangan presiden dan Angkatan Darat (Noer, 1987:367).

## **5.4 NU Dan Para Pemeran Demokrasi Terpimpin Lainnya**

### **5.4.1 NU Dan Soekarno**

Kemampuan NU untuk tetap berperan dalam Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipungkiri sangat didukung oleh kemampuan para pemimpinnya dalam menjalin hubungan pribadi dengan Presiden Soekarno. Mereka dapat menjalin hubungan baik, karena pemahaman mereka satu sama lain yang sama-sama dilandasi dengan kuat oleh nilai-nilai budaya Jawa. Nahdatul Ulama dapat menghargai peranan “sesepuh” yang dimainkan oleh Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin. Pada hakekatnya hal itu sama dengan peranan yang dimainkan Rois Aam di dalam Nahdatul Ulama sehingga tidak mengherankan jika tokoh-tokoh Nahdatul Ulama seperti K.H. Wahab

Chasbullah, K.H. Idham Chalid, K.H. Saifuddin Zuhri dan H. A. Sjaichu masuk kedalam lingkup orang-orang yang terdekat dengan Soekarno.

Pengakuan Nahdatul Ulama terhadap kemampuan Soekarno dapat dilihat hingga masa sebelum proklamasi kemerdekaan, ketika pemerintah kolonial Belanda mendekati masa keruntuhannya. Pada bulan Juni 1940 dalam suatu pertemuannya di Mukhtamar Nahdatul Ulama ke XV, sebelas ulama terkemuka menyetujui organisasi tersebut untuk memilih Soekarno sebagai presiden negara Indonesia yang akan datang (Anam,1985:112). Soekarno juga mempunyai kedekatan dan hubungan yang baik dengan dua tokoh utama Nahdatul Ulama yaitu K.H. Wahab Chasbullah dan K.H.A. Wahid Hasyim. Kedekatan K.H.A. Wahid Hasyim dan Soekarno bermula ketika mereka berdua pernah sama-sama terlibat dalam BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Dari hubungan di dalam kepanitiaan tersebut maka Wahid Hasyim dan Soekarno telah saling mengenal pribadi satu sama lain. Di lain pihak pada tahun 1950, Nahdatul Ulama bersikap kritis terhadap Soekarno. Pada saat itu Soekarno mengemukakan gagasan negara berdasar Islam karena dapat menimbulkan separatisme dikalangan etnik-etnik non-muslim. Nahdatul Ulama turut memprotesnya bersama Masyumi dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Protes Nahdatul Ulama secara khusus ditujukan kepada pendapat Soekarno bahwa pemerintahan Islam tidak akan mampu memelihara persatuan nasional. Nahdatul Ulama juga tidak mau berkompromi terhadap gagasan kabinet empat kaki (PNI, Masjumi, NU dan PKI) yang terkandung dalam konsepsi presiden. Meskipun konsepsi tersebut akhirnya diterima dengan pertimbangan faktor nama baik Soekarno dan keikutsertaan PKI dalam kabinet tetap ditolak. Sikap ini menunjukkan bahwa Nahdatul Ulama menjalankan prinsip *'itidal* (menjunjung tinggi keharusan berlaku lurus) dan mencegah yang *munkar* (perbuatan yang dilarang) terhadap setiap gagasan yang menghina Islam, juga pada keinginan Soekarno untuk merangkul PKI yang dipandang sebagai musuh oleh Nahdatul Ulama.

Dalam periode Demokrasi Terpimpin Soekarno memberikan imbalan terhadap Nahdatul Ulama, dikarenakan adanya dukungan selama ini yang diberikan oleh Nahdatul Ulama kepadanya. Dari setiap kabinet yang dibentuk oleh Soekarno, jabatan menteri agama selalu jatuh ke tangan Nahdatul Ulama. Sejak 2 Maret 1962 kursi menteri agama diduduki oleh K.H. Saifuddin Zuhri menggantikan Menteri Muda Agama K. H. Wahib Wahab beliau adalah putra dari K.H. Wahab Chasbullah. Untuk jabatan menteri penghubung Alim Ulama diduduki K.H. Fatah Jasin yang terus menjabat sepanjang periode Demokrasi Terpimpin.

Para pemimpin lainnya seperti Zainul Arifin menjabat sebagai ketua DPRGR hingga wafat pada tahun 1963. Sedangkan K.H. Idham Chalid menjabat sebagai ketua II MPRS. Pada tahun 1962 kedua tokoh ini masuk ke dalam kabinet sebagai menteri. Keterlibatan Nahdatul Ulama dalam Kabinet-kabinet Soekarno tidak banyak berpengaruh terhadap kebijakan aktual. Namun posisi ini membantu Nahdatul Ulama untuk membangun dan menyediakan sistem patronase bagi para pendukungnya di berbagai provinsi. Faktor patronase ini turut menunjang dukungan para pemimpin Nahdatul Ulama yang berada di tingkat wilayah serta cabang terhadap kedekatan hubungan antara tokoh-tokoh pucuk pimpinan Nahdatul Ulama dengan Soekarno.

Hangatnya hubungan Nahdatul Ulama dengan Soekarno juga tercermin dalam koran Partai Nahdatul Ulama yaitu koran Duta Masyarakat. Setiap pernyataan Soekarno dalam periode ini, selalu mendapatkan dukungan dari para pemimpin Nahdatul Ulama. Seperti dalam masalah Irian Barat, Konfrontasi dengan Malaysia, pengambil alihan perusahaan asing, Deklarasi Ekonomi (Dekon) dan keluarnya Indonesia dari PBB. Ideologi resmi dari Soekarno MANIPOL-USDEK sering dijadikan rujukan untuk melengkapi kaidah-kaidah fiqih dalam setiap pernyataan-pernyataan resmi dan para pemimpin Nahdatul Ulama. Pada tahun 1964 Idham Chalid dan Saifuddin Zuhri mendirikan Yayasan Api Islam yang bertujuan menyebarkan ajaran-ajaran Soekarno di kalangan muslim tradisional. Sedangkan Kiai Wahab yang juga pengagum Soekarno sejak jaman pergerakan. Ia tetap membela Soekarno hingga akhir, seperti yang terlihat dalam perayaan ulang tahun NU ke 40

pada bulan Januari tahun 1966. Saat itu Soekarno sudah berada di akhir kekuasaannya, namun berkat kharisma Kiai Wahab yang masih mendukungnya tidak ada satupun suara sumbang dari *nahdliyin* yang ditujukan kepada Soekarno (Bruinessen, 1999:75).

#### 5.4.2 NU Dan Angkatan Darat

Hubungan Nahdatul Ulama dan Angkatan Darat (AD) telah dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan. Pasukan Hizbullah dan Sablillah yang dipelopori oleh Nadhtaul Ulama bekerja sama dengan Angkatan Darat untuk memenangkan perang kemerdekaan. Sebagian besar latar belakang dari pasukan ini adalah para santri dan kiai. Maka tidak mengherankan ketika diadakan *demobilisasi* pada tubuh Angkatan Bersenjata pada tahun 1950. Banyak anggota dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang dinonaktifkan daripada mereka yang digabungkan ke dalam satuan tentara reguler. Karena mempunyai peranan penting dalam revolusi kemerdekaan, maka Angkatan Darat dengan dipelopori oleh A.H. Nasution memiliki tuntutan untuk berperan lebih luas dalam penyelenggaraan negara. Tuntutan ini makin berkembang khususnya setelah berbagai ketidakstabilan politik dalam masa demokrasi parlementer (Sundahaussen, 1998:214)

Dukungan dari Nahdatul Ulama ini mendapat sambutan yang baik dari Angkatan Darat, khususnya kepala stafnya MayJend. A.H. Nasution. Suatu hubungan kerjasama antara pimpinan Angkatan Darat dan pimpinan Nahdatul Ulama yang telah terjalin pada awal demokrasi terpimpin. Titik persamaan antara Nahdatul Ulama dan Angkatan Darat dalam kurun waktu Demokrasi Terpimpin adalah keinginan keduanya untuk membendung sekecil mungkin pengaruh PKI. Untuk kepentingan itu Angkatan Darat mengajak Nahdatul Ulama bekerja sama. Seperti yang terungkap dalam rapat Fraksi Nahdatul Ulama dalam DPRGR yang diadakan pada tanggal 29 Nopember 1961, serta dukungan yang ditunjukkan oleh MayJend. A.H. Nasution terhadap pendirian Liga Demokrasi yang dipelopori oleh K.H.M. Dahlan dan Imron Rosjadi. Selain menentang pembubaran DPR, Liga demokrasi yang dipimpin oleh

tokoh-tokoh Nahdatul Ulama, Masyumi dan PSI yang memiliki sikap umum anti komunis. Namun Angkatan Darat tidak dapat berbuat banyak ketika pada bulan Maret tahun 1961 Liga demokrasi dibubarkan oleh Presiden dengan tuduhan bertentangan dengan Manipol (Noer, 1987:402).

Pada tanggal 8 Juli tahun 1960 PKI mengeluarkan dokumen berjudul “Sebuah evaluasi mengenai Kabinet Kerja sesudah satu tahun bekerja” yang isinya menyerang sejumlah menteri, termasuk MayJend. A.H. Nasution sebagai menteri pertahanan keamanan. Dokumen ini mendapat reaksi keras dari Angkatan Darat berupa penangkapan anggota CC (*Comille Central*) PKI oleh *Garnisun* Jakarta untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 12 September 1960 sayap yang paling anti komunis dalam Angkatan Darat mengemukakan pandangannya bahwa konsep Nasakom tidak dapat dilaksanakan, dan PKI harus dilarang. Menanggapi pernyataan ini Imron Rosjadi menghubungi MayJend. A.H. Nasution dan menyarankan kepada beliau agar Angkatan Darat mengambil alih kekuasaan dan Imron Rosjadi menjanjikan dukungan Nahdatul Ulama terhadap tindakan ini. Namun MayJend. A.H. Nasution menolak gagasan itu. Sampai sejauh ini Imron Rosjadi, yang saat itu menjabat sebagai ketua umum GP Ansor adalah tokoh yang menghubungkan antara Nahdatul Ulama dengan Angkatan Darat. Sebelum akhirnya ia ditahan pada tahun 1962, karena kegiatan anti Demokrasi Terpinpinnya (Sundhaussen,1998:93).

Tokoh muda lainnya yang menggantikan Imron Rosjadi dalam menghubungkan Nahdatul Ulama dengan Angkatan Darat adalah Subchan Z.E. Sejak tahun 1962 Subchan Z.E menjadi ketua IV Nahdatul Ulama yang muncul sebagai tokoh muda Nahdatul Ulama. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan pihak militer, partai-partai agama serta kalangan mahasiswa. Berkat peranan dari Subchan Z.E. dan atas dukungan dari Angkatan Darat, pada tanggal 4 Oktober 1965 berdirilah KAP Gestapu (Komite Aksi Pengganyangan Kontra Revolusi G30S) yang bertujuan untuk mengorganisasi rakyat melawan PKI. Kerja sama antara Nahdatul Ulama dengan Angkatan Darat semakin erat, ketika dalam aksi pembersihan terhadap PKI pasca G30S di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Adanya kesamaan orientasi dalam

hal anti komunis mewarnai hubungan antara Nahdatul Ulama dengan Angkatan Darat sepanjang Demokrasi Terpimpin. Bagi Nahdatul Ulama kedekatan dengan Angkatan Darat adalah dalam rangka memperkuat kedudukannya dalam menghadapi PKI demikian juga sebaliknya. Pada akhirnya Nahdatul Ulama dan Angkatan Darat mendapat manfaat dari kedekatan hubungan kerja sama yang terjadi. Yang pada akhirnya PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada bulan Maret 1966.

#### **5.4.3 NU dan Partai-partai lainnya.**

Nahdatul Ulama dan PNI (Partai Nasional Indonesia) telah memiliki hubungan yang baik sejak masa Demokrasi Parlementer. Kedua partai ini memiliki banyak pendukung dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jika dibandingkan dengan ideologi partai-partai lain, ideologi nasionalisme dari PNI adalah yang paling dapat diterima oleh NU. Kedua partai ini juga sangat menghormati Soekarno sebagai pemimpin nasional. Kepernimpinan keduanya didominasi oleh nilai-nilai budaya Jawa. Dalam banyak segi Nahdatul Ulama lebih banyak memiliki persamaan dengan PNI daripada dengan Masyumi. Terhadap Masyumi Nahdatul Ulama memiliki kekecewaan yang mendalam dikarenakan sikap Masyumi yang tidak dapat menghargai gaya kepemimpinan Nahdatul Ulama.

Dalam kurun waktu sejak Nahdatul Ulama berubah menjadi partai politik hingga periode Demokrasi Terpimpin. Hubungan Nahdatul Ulama dengan PNI adalah hubungan yang paling erat dibandingkan dengan partai-partai lainnya. Seperti yang terlihat pada masa Kabinet Ali-Roem-Idham (PNI-Masyumi-NU) yang menyerahkan mandatnya pada tanggal 14 Maret 1956. Pada saat itu Nahdatul Ulama menyerahkan konsepsi yang menghendaki kabinet baru tanpa adanya keikutsertaan PKI. Konsepsi ini dapat diterima oleh PNI dan Soekarno. Sementara itu keikutsertaan Masyumi dalam kabinet baru ditolak oleh PNI, penolakan ini lebih dikarenakan jatuhnya kabinet Ali-Roem-Idham yang salah satu faktor penyebabnya adalah dengan ditariknya dukungan Masyumi terhadap kabinet tersebut. Selain sebagai penyeimbang karena PKI tidak diikuti sertakan dalam kabinet yang akan dibentuk.

Hubungan antara PNI dan PKI juga tidak selalu mulus. Terlebih setelah diadakannya pemilihan umum tingkat provinsi di Jawa pada tahun 1957. PKI muncul sebagai pemenang dalam pemilu dengan kerugian suara di pihak PNI. Jumlah pemilih PNI berkurang dibanding hasil suara pemilu tahun 1955. Sementara itu kelebihan suara yang di dapat oleh PKI dalam pemilu tahun 1957 adalah sama dengan jumlah kerugian suara PNI. Akibatnya para pemimpin partai di daerah mendesak dihentikannya kerja sama antara PNI dan PKI di ibukota. Di berbagai daerah di Pulau Jawa PNI menjalin persekutuan dengan Nahdatul Ulama dalam menghadapi PKI. Kerja sama ini menjadi semakin erat setelah PKI melancarkan “aksi sepihak” dalam rangka melaksanakan *land reform* di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sasaran dan aksi sepihak PKI merupakan anggota PNI dan Nahdatul Ulama di desa-desa. Meskipun berada dalam satu kerangka yaitu kerangka Nasakom. PNI, NU dan PKI di tingkat pusat dapat bekerja sama dengan baik, sebaliknya hal yang kontras terjadi di daerah-daerah pendukung PNI dan Nahdatul Ulama terlibat konflik dengan PKI.

Di sisi lain Nahdatul Ulama memiliki kewaspadaan terhadap PNI dan PKI. Dikarenakan kedua partai ini berkeinginan untuk merebut anggota Nahdatul Ulama. Salah satu upaya mereka adalah dengan membentuk organisasi agama yang dapat menarik simpati para *nahdliyin*. PKI memiliki rencana untuk membangkitkan PKI lokal Islam. Dalam konferensi nasionalnya di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1964, PKI memutuskan melaksanakan pengkajian pengembangan agama di Indonesia sebagai basis kerja sama Nasakom yang lebih baik. Pemimpin PKI D.N.Aidit berusaha keras ingin menghilangkan pendapat masyarakat bahwa PKI adalah kaum anti-agama dengan menyatakan bahwa sesungguhnya bukan kaum komunis yang merusak agama, justru mereka yang anti-komunis itulah yang merusak agama.

PNI mendirikan Jamiyatul Muslimin Indonesia untuk menarik simpati kalangan Islam. Dalam hal ini PNI menempatkan mantan Sekjen PNI yang bernama Sabilal Rasjad sebagai ketua Jamiyatul Muslimin Indonesia (JMI). Dalam keterangannya kepada “Pembina” Sabilal Rasjad menyatakan anggota JMI ada 700.000 orang. Menghadapi JMI, Partai Besar Nahdatul Ulama menginstruksikan kepada pengurus

wilayah-wilayah dan cabang-cabang untuk memberitahukan kepada para ulama Nahdatul Ulama agar tidak terpengaruh untuk bergabung dengan JMI. Berbagai upaya yang dilakukan PNI dan PKI untuk merebut simpati para *nahdliyin* itu tidak banyak membuahkan hasil. Kalangan pesantren memiliki kecenderungan untuk semakin menguatkan persatuannya ketika komunitas mereka sebagai penganut *Ahlusunnah Wal Jama'ah* akan diusik oleh kekuatan yang membawa kepentingan di luar agama. Sikap-sikap normatif Nahdatul Ulama yang mengacu pada berlakunya kompromi (*Tasamuh*) dan jalan tengah (*Tawasuth*) segera dikesampingkan dan lebih mengutamakan sikap *Tawadhuk* (kepatuhan kepada para pemimpin dan ulama).

Dengan partai Islam lainnya PSII dan Perti yang masih tetap bertahan dalam Demokrasi Terpimpin. Nahdatul Ulama tidak memiliki persoalan apapun serta dapat bekerja sama dengan baik. Kerja sama yang mereka jalin terlihat dalam lembaga politik DPRGR, yaitu dengan membentuk golongan Islam dalam DPRGR pada tahun 1960 yang dipimpin oleh H.A. Sjaichu perwakilan dari Nahdatul Ulama dengan Wakil Ketua I diduduki oleh Harsono Cokroaminoto perwakilan dari PSII dan Wakil Ketua II diduduki oleh K.H. Siradjuddin Abbas perwakilan dari Perti. Segi yang membedakan antara Perti dengan NU dan PSII adalah mengenai hubungan luar negeri. Berbeda dengan para pemimpin NU dan PSII, K.H. Siradjuddin Abbas perwakilan dari Perti sering menghadiri kongres di luar negeri yang diselenggarakan oleh organisasi atau negara komunis (Noer,1987:397).

## BAB 7. PENUTUP

### 7.1 Simpulan

Lahirnya konsep Demokrasi Terpimpin di Indonesia dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul dalam politik Indonesia pada pertengahan tahun 1950. Untuk menggantikan pertentangan yang terjadi diantara partai-partai di dalam parlemen maka suatu sistem diciptakan kembali, dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Soekarno berusaha mengumpulkan seluruh kekuatan politik yang saling bersaing dari Demokrasi Terpimpin dengan jalan turut membantu mengembangkan kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Soekarno menciptakan suatu ideologi nasional yang mengharapakan seluruh warga negara memberi dukungan kesetiaan kepadanya. Pancasila ditekankan olehnya dan dilengkapi dengan serangkaian doktrin seperti MANIPOL-USDEK dan Nasakom.

Dalam sistem demokrasi terpimpin partai-partai politik tidak lagi menjadi pemeran utama di atas panggung politik Indonesia. Di sisi lain sebagai dua kekuatan partai politik besar yang tersisa selain PKI dan PNI. NU justru mengalami demoralisasi ketika tatanan Demokrasi Terpimpin dimulai. Setelah pertengahan tahun 1960 PNI, NU dan PKI lebih kelihatan menjadi sekutu Soekarno daripada lawan. Kerja sama antara partai-partai tersebut dengan Soekarno dan satu sama lainnya dirumuskan oleh Soekarno dalam semboyan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis). Dalam hal ini, eksponen Nasionalis diwakili oleh PNI, Agama diwakili NU dan Komunis diwakili PKI. Dengan ini PNI, NU dan PKI memiliki kebenaran ideologis untuk turut berperan dalam kelangsungan sistem Demokrasi Terpimpin.

Bagi Nahdatul Ulama secara konstektual Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia pada saat itu adalah Demokrasi Terpimpin. NU menjadikan sifat kepemimpinan Nahdatul Ulama yang luwes sebagai dasar mereka untuk menerima sistem Demokrasi Terpimpin. Kiprah Nahdatul Ulama pada masa

demokrasi terpimpin tidak bisa dilepaskan begitu saja. Nahdatul Ulama mampu menjadi partai politik yang bisa bekerja sama sekaligus masuk ke dalam berbagai lembaga politik yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Dua lembaga politik yang mampu bekerja sama dengan Nahdatul Ulama diantaranya adalah Dewan Perancang Nasional dan Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara. Kedua lembaga politik ini dinilai sebagai bagian eksekutif yang tidak memerlukan landasan dalam UUD 1945. Kedua lembaga ini merupakan cerminan dari keinginan pemerintah untuk menertibkan aparat administrasi negara. Demikian pula yang terjadi dengan MPRS dan DPA yang dipilih melalui pengangkatan Presiden. Meskipun Nahdatul Ulama turut menjadi anggota dalam lembaga-lembaga politik tersebut, namun keanggotaannya tidak cukup untuk mengangkat peranan lembaga-lembaga tersebut. Hakekat dan keberadaan lembaga-lembaga politik tersebut hanyalah sebagai alat kelengkapan dari gagasan Demokrasi Terpimpin, sementara kekuasaan yang terbesar secara pasti mengalir ke tangan presiden dan Angkatan Darat.

Sementara itu hubungan lain ditunjukkan oleh Nahdatul Ulama melalui kerja sama yang terjalin diantara Nahdatul Ulama dengan Angkatan Darat (AD). Hubungan kerja sama ini telah dimulai sejak masa revolusi kemerdekaan. Pasukan Hizbullah dan Sablillah yang dipelopori oleh Nahdatul Ulama bekerja sama dengan Angkatan Darat untuk memenangkan perang kemerdekaan. Dukungan dari Nahdatul Ulama ini mendapat sambutan yang baik dari Angkatan Darat, khususnya dari kepala stafnya yaitu MayJend. A.H. Nasution. Suatu hubungan kerja sama antara pimpinan Angkatan Darat dan pimpinan Nahdatul Ulama yang telah terjalin pada awal demokrasi terpimpin. Titik persamaan antara Nahdatul Ulama dan Angkatan Darat dalam kurun waktu Demokrasi Terpimpin adalah keinginan keduanya untuk membendung sekecil mungkin pengaruh PKI. Untuk kepentingan itu Angkatan Darat mengajak Nahdatul Ulama bekerja sama. Seperti yang terungkap dalam rapat Fraksi Nahdatul Ulama dalam DPRGR yang diadakan pada tanggal 29 Nopember 1961, serta dukungan yang ditunjukkan oleh MayJend. A.H. Nasution terhadap pendirian Liga Demokrasi yang dipelopori oleh K.H.M. Dahlan dan Imron Rosjadi. Selain

menentang pembubaran DPR, Liga demokrasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Nahdatul Ulama, Masyumi dan PSI yang memiliki sikap umum anti komunis.

Sementara itu Nahdatul Ulama juga mampu mengukir prestasi pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu dengan berdirinya IAIN (Institut Agama Islam Negeri) pada tanggal 24 Agustus tahun 1960 dengan Kota Yogyakarta sebagai pusatnya. Saifuddin Zuhri yang pada masa itu menjabat sebagai menteri agama terakhir pada periode Soekarno, adalah orang yang paling berjasa dalam pengembangan IAIN. Antara kurun waktu tahun 1962 dan 1967 Saifuddin Zuhri juga mendirikan IAIN di kota-kota besar lainnya seperti di Jakarta, Banda Aceh, Surabaya, Ujung Pandang, Banjarmasin, Padang, Palembang dan Jambi. Serta sekitar 15 IAIN cabang kecil di beberapa kabupaten. IAIN sangat berguna bagi kalangan pesantren karena memberikan saluran mobilitas sosial. Bagi para pelajar yang meneruskan ke jenjang perguruan tinggi tetapi sulit diterima di universitas-universitas umum, maka dengan didirikannya IAIN sebagai batu loncatan. Dapat membuat mereka yang berasal dari kalangan pesantren mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## 7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada halaman sebelumnya, penulis dapat memberikan saran diantaranya sebagai berikut :

1. bagi penulis, penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga untuk menambah pemahaman materi sejarah nasional Indonesia khususnya peranan NU dalam Politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin
2. bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1969-1965

3. bagi pengurus wilayah NU, merupakan sumbangan pemikiran dan referensi tentang peranan Nahdatul Ulama dalam Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965
4. bagi umat NU, penelitian ini mampu menjadi acuan untuk perkembangan NU ke depannya



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Moh. 1982. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Grafindo.
- Anam, C. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdatul Ulama*. Surabaya : Jatayu  
Natala
- Bruinessen, Martin Van. 1999. *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana  
Baru*. Yogyakarta: LKIS.
- Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan
- Duverger, M. 1998. *Sosiologi Politik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka
- Fealy,Greg. 2003. *Ijtihad Politik Ulama Sejarah Nahdatul Ulama 1952-1967*.  
Yogyakarta: LKIS.
- Feith, H.1995. *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : Pustaka  
Sinar Harapan
- Gaffar, Afan. 2003. *Politik Indonesia: Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar
- Gootschalk, L. 1983. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press
- Haidar, A. M. 1998. *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia  
Pustaka Utama
- Karim, Rusli. 1993. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah potret Pasang  
Surut* . Jakarta : rajawali Pers
- Maarif, S. 1996. *Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*. Jakarta : PT Gema  
Insani Press
- Maarif, S. 1998. *Studi Tentang Percaturan dalam Percaturan Konstitusi Islam dan  
Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP3ES
- Muhajir, A. 2007 . *Idham Chalid: Guru politik orang NU*, Yogyakarta: LKIS
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Politik Islam di Pentas Politik Nasional 1945-1965*.  
Jakarta Graffiti Press

- Notosusanto, N. 1971. *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sedjarah*.  
Djakarta: Pusat Sedjarah ABRI Dephankam. Penerbit Yayasan Kanisius
- Poesponegoro, Djoened. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*. Jakarta :  
Depdikbud-Bali Pustaka.
- Sjamsuddin.N. 1989. *Integritas Politik di Indonesia*. Jakarta. Gramedia
- Sundhaussen, Ulf. 1998. *Politik Militer Indonesia 1945-1957: Menuju Dwifungsi  
ABRI*. Jakarta : LP3ES
- Surakhmat, W. 1980. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Jakarta :  
Tarsito
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan  
Penerbit Universitas Jember



## Lampiran 2

**SUSUNAN PENGURUS BESAR NU 1956-1966****Susunan Pengurus Besar NU 1956-1959**

Rais 'am	K.H Abdul Wahab Chasbullah
Wakil Rais'am	K.H. Bisri Sjansuri
Ketua Umum	H. Idham Chalid
Wakil Ketua Umum I	K.H.M. Dachlan
Wakil Ketua Umum II	H. Imron Rosjadi
Wakil Ketua Umum III	H. Djamaluddin Malik
Sekretaris Umum	K.H.Saifuddin Zuhri
Wakil Sekretaris Umum	K.H. Ahmad Siddiq
Anggota (wakil Muslimat)	Ny. H. Mahmudah Mawardi

**Susunan Pengurus Besar NU 1959-1962**

Rais 'am	K.H Abdul Wahab Chasbullah
Wakil Rais'am I	K.H.Bisri Sjansuri
Wakil Rais'am II	K.H.M.Dachlan
Wakil Rais'am III	K.H. Musta'in
Katib I	K.H. Achmad Baquir Marzuqi
Katib II	K.H. Abdul Djalil
Katib III	K.H. Abdul Chalim
Ketua Umum	K.H. Idham Chalid
Ketua I	K.H. Masjkur
Ketua II	H. Zainul Arifin

Ketua III	K.H. Anwar Musaddad
Sekretaris Umum	K.H. Saifuddin Zuhri
Wakil Sekretaris Umum	H. Aminuddin Azis

**Susunan Pengurus Besar NU 1962-1966**

Rais 'am	K.H Abdul Wahab Chasbullah
Ketua Umum	H. Idham Chalid
Ketua I	K.H.M. Dachlan
Ketua II	H. Zainul Arifin
Ketua III	K.H. A. Sjaichu
Ketua IV	H. Subchan Z.E
Sekretaris Umum	H. Aminuddin Azis
Wakil Sekretaris Umum	A.A. Achsien

## MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul	Permasalahan	Jenis dan Sifat Penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Nasional	Peranan Nahdatul Ulama dalam Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana konsep dan pandangan masa Demokrasi Terpimpin?</li> <li>2. Bagaimana persaingan dan kerja sama politik NU pada masa demokrasi terpimpin?</li> <li>3. Bagaimana peranan Nahdatul Ulama dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis Penelitian Sejarah</li> <li>2) Sifat Penelitian Studi Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Buku</li> <li>2) Skripsi</li> <li>3) Artikel</li> <li>4) Laporan Penelitian</li> </ol> <p>Yang diperoleh dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember</li> <li>2) Perpustakaan Program Studi Sejarah Universitas Jember</li> <li>3) Perpustakaan Daerah di Jember</li> </ol>	<p>Metode Penelitian Sejarah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Heuristik</li> <li>2) Kritik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekstern</li> <li>• Intern</li> </ul> </li> <li>3) Interpretasi</li> <li>4) Historiografi</li> </ol> <p>Pendekatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosiologi politik</li> </ul> <p>Teori :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan kebijakan Laswell</li> </ul>